



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**PERATURAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PEMALANG**

NOMOR : 050 / 1311 / 2020

TENTANG

**RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PERATURAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2021**

**PERATURAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PEMALANG**

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin agar program dan kegiatan tahunan berjalan efektif, efisien dan bersasaran maka diperlukan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang tentang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2021;
- Mengingat : 1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 7) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 59);
 - 8) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 - 9) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - 10) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - 11) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 - 12) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Bersekala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);
 - 13) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 - 14) Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagai Bencana Nasional;
 - 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 18) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 130/736/SJ tanggal 27 Januari 2020 tentang Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
- 19) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
- 20) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6);
- 21) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5);
- 22) Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Pemalang Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2009 Nomor 1);
- 23) Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 9);
- 24) Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2016 – 2021(Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12);

25)Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13);

26)Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1);

27)Peraturan Bupati Pemalang Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang;

28)Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang;

29)Peraturan Bupati Pemalang Nomor 34 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PEMALANG TENTANG RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2021.

Pasal 1

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang

Tahun 2021 merupakan dokumen yang memuat program dan kegiatan untuk kurun waktu 1 (satu) Tahun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pemalang Tahun 2021.

Pasal 2

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2021 dengan Sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

Pasal 3

Isi, Uraian dan Rincian Rencana Kerja Satuan kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

Peraturan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal, 12 Agustus 2020

**KEPALA DINAS PMPTSP KABUPATEN PEMALANG
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN**



KHAERON, SH, MM

Pembina Tk. I

NIP. 19680323 199003 1 012

DAFTAR ISI

BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	6
1.4. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II	9
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....	9
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	9
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat daerah.....	15
2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	28
2.3.1 Tantangan dan Hambatan berdasarkan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP Kabupaten Pemalang	28
2.3.2 Peluang dan Potensi berdasarkan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP Kabupaten Pemalang	28
2.3.3 Solusi untuk menyelesaikan hambatan dengan program dan kegiatan di DPMPTSP Kabupaten Pemalang antara lain :	29
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	29
2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat	40
BAB III.....	41
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	41
PERANGKAT DAERAH.....	41
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	41
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	48
3.3 Program dan Kegiatan	49
BAB IV	63
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	63
BAB V	71
PENUTUP.....	71

Lampiran :Peraturan Kepala Dinas PMPTSP
Kabupaten Pematang
Nomor :
Tanggal :

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelaksanaan Undang-undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, membawa konsekuensi perubahan atas penyempurnaan mekanisme dan sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang berpedoman pada asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsional, akuntabilitas, efisiensi dan efektif.

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan untuk mewujudkan kondisi yang ideal melalui capaian sasaran dan tujuan yang ditetapkan serta dilaksanakan secara berkelanjutan melalui tahapan yang telah direncanakan didasarkan pada kondisi yang ideal.

Perencanaan Pembangunan dapat diartikan sebagai suatu perumusan alternatif atau keputusan yang didasarkan pada data-data serta fakta-fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan atau aktifitas kemasyarakatan baik yang bersifat fisik (material) maupun non fisik (mental dan spiritual) dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik.

Berhasil tidaknya proses pembangunan tergantung pada sejauh mana kualitas perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah disusun dalam rangka mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah dan memberikan arah serta pedoman dalam pelaksanaan pembangunan.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan adanya penyempurnaan sistem perencanaan pembangunan termasuk di dalamnya perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka meliputi :

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan makro untuk jangka waktu 20 tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang yang digunakan sebagai pedoman penyusunan RPJM Daerah setiap lima tahun sekali;
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang berfungsi sebagai penjabaran RPJP Daerah dan memuat visi, misi, gambaran umum kondisi masa kini, gambaran umum kondisi yang diharapkan, analisis lingkungan internal dan eksternal, arah kebijakan strategi dan indikasi program 5 tahun secara lintas pembiayaan.
- c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disusun sebagai dokumen perencanaan tahunan dan merupakan kompilasi kritis atas Renja OPD setiap tahun anggaran.

Sedangkan Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun 2 dokumen perencanaan yaitu Rencana Strategis SKPD untuk jangka waktu 5 tahun dan Rencana Kerja (Renja) SKPD untuk jangka waktu 1 tahun.

Adapun Visi dan Misi Kabupaten Pemalang, sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

- a. **Visi : “TERWUJUDNYA PEMALANG HEBAT YANG BERDAULAT, BERJATIDIRI, MANDIRI DAN SEJAHTERA”.**
- b. **Misi :**
 1. Meningkatkan akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah berdasarkan azas musyawarah mufakat, dan gotong royong.
 2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan, derajat kesehatan masyarakat, keluarga berencana, serta peningkatan keberdayaan perempuan, perlindungan sosial dan anak.
 3. Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan kedaulatan pangan berbasis sumberdaya lokal untuk menanggulangi kemiskinan dan pengangguran.
 4. Meningkatkan sarana prasarana dasar serta memperkuat sentra-sentra produksi berbasis kewilayahan sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayah.
 5. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang agamis, toleran, harmonis, dan saling menghormati.
 6. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, penegakan supermasi hukum serta kemudahan investasi dan daya saing daerah.
 7. Menumbuhkan kembali budaya asli daerah sebagai landasan pembentukan jati diri dan kepribadian masyarakat.

Seiring dengan perubahan global yang terjadi akibat meningkatnya penyebaran pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang sangat berpengaruh pada kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, maka perlu langkah – langkah strategis untuk mengatasinya yang dirumuskan dalam fokus pembangunan 2021.

Untuk menyikapi perubahan situasi dan kondisi akibat dampak Covid -19, maka perlu penyesuaian arah kebijakan pembangunan 2021 dari yang sebelumnya telah dirumuskan dalam RPJMD 2016 – 2021. Mengingat dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan Covid -19 , maka kebijakan pembangunan Kabupaten Pemalang tahun 2021 diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemulihan ekonomi dan sosial yang didukung sumber daya manusia yang berkualitas. Pada tahap ini pembangunan difokuskan pada : 1). Pemulihan dampak Pandemi Covid -19; 2). Peningkatan kualitas hidup dan kualitas sumber daya manusia; 3). Peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah; 4). Penguatan ketahanan bencana

Sejalan dengan perubahan arah kebijakan pembangunan tersebut diatas, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang harus dapat menjabarkannya dalam Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah..

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum yang menjadi rujukan dalam penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembarane Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 7) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 59);
 - 8) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 - 9) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - 10) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 - 11) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia nomor 6322);
 - 12) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Bersekala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);
 - 13) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 - 14) Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional;
 - 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka

- Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - 18) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 130/736/SJ tanggal 27 Januari 2020 tentang Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
 - 19) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
 - 20) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6);
 - 21) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5);
 - 22) Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Pemalang Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2009 Nomor 1);
 - 23) Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 9);
 - 24) Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12);
 - 25) Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1);
 - 26) Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13);

- 27) Peraturan Bupati Pematang Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pematang;
- 28) Peraturan Bupati Pematang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pematang;
- 29) Peraturan Bupati Pematang Nomor 34 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2020;

1.3. Maksud dan Tujuan

Bahwa maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah ini adalah untuk menyusun arah dan kebijakan SKPD pada Tahun Anggaran 2021 sesuai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 dan Selaras dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pematang 2016-2021.

Seiring dengan perubahan global yang terjadi akibat meningkatnya penyebaran Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang sangat berpengaruh pada kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, maka perlu langkah-langkah Strategis untuk mengatasinya, yang di rumuskan dalam fokus Pembangunan Tahun 2021

Untuk menyikapi perubahan situasi dan kondisi akibat dampak Covid-19 maka perlu penyesuaian arah kebijakan pembangunan Tahun 2021 dari yang sebelumnya telah dirumuskan dalam RPJMD 2016-2021. Mengingat dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan Covid-19, maka kebijakan pembangunan Kabupaten Pematang Tahun 2021 diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemulihan ekonomi dan sosial yang didukung sumber daya manusia yang berkualitas. Pada tahap ini pembangunan difokuskan pada :

1. Pemulihan dampak Pandemi Covid-19
2. Peningkatan kualitas hidup dan kualitas Sumber Daya Manusia
3. Peningkatan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan
4. Penguatan Ketahanan Bencana

Dimana arah dan kebijakan SKPD harus dapat dituangkan dalam Rencana Kerja SKPD Tahun 2021 yang disusun melalui prioritas program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan urusan wajib yang diampunya. Prioritas Program dan kegiatan tersebut nantinya menjadi dasar pelaksanaan APBD Tahun 2021 guna dapat mendukung kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pematang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya yaitu melaksanakan urusan Pemerintahan di Bidang Penanaman Modal

1. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang adalah:

- a. Menjabarkan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan Renstra SKPD guna melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang pada Tahun 2021.
- b. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang dalam melaksanakan tugas dibidang Penanaman Modal, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan pada Tahun 2021 dapat tercapai.
- c. Mengendalikan kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.
- d. Menjadi kerangka dasar bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang dalam melaksanakan pelayanan perijinan secara terpadu pada Tahun 2021.

2. Tujuan

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang adalah untuk :

- a. Memberikan acuan bagi para stakeholders di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang dalam melaksanakan program dan kegiatan pada Tahun 2021 guna menunjang pelaksanaan tugas.
- b. Memberikan tolok ukur guna pengukuran dan evaluasi kinerja selama Tahun 2021 bagi para stakeholders Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang.
- c. Memberikan arah dan tujuan bagi para stakeholders Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang dalam melaksanakan program dan kegiatan selama Tahun 2021 guna mencapai tujuan.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika dalam penyusunan Rencana kerja Perangkat Daerah ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review Terhadap Rancangan awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dalam Tahun Anggaran 2020 merupakan tahun keempat berdirinya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang berdasarkan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang dan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang dimana dalam Tahun Anggaran 2019 yang lalu memperoleh alokasi dana APBD sebesar Rp. 5.299.878.000,00 dan mendapat tambahan anggaran melalui Anggaran Perubahan (DPPA) Rp. 3.268.850.000,00 sehingga total pagu anggaran yang APBD yang dikelola oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang sebesar Rp. 8.568.728.000,00 Dengan realisasi anggaran Sebesar Rp. 6.837.916.786 (79,80%), yang tersebar dalam kelompok Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dengan perincian sebagai berikut :

No	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Tidak Langsung	Rp. 2.821.288.000,00	Rp. 2.548.956.043,00	90,35
2	Belanja Langsung	Rp. 5.747.440.000,00	Rp. 4.288.960.743,00	74.62
TOTAL		Rp. 8.568.728.000,00	Rp. 6.837.916.786,00	79,80

Anggaran yang diterima tersebut diupayakan untuk dapat melaksanakan tugas-tugas Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu guna memenuhi tuntutan masyarakat tentang pelayanan perijinan yang baik, transparan, demokratis, efisien dan efektif serta sederhana yang disesuaikan dengan kewenangan, tuntutan dan kebutuhan daerah.

Adapun capaian kinerja pelaksanaan Renja tahun 2019 sebagaimana tertuang dalam tabel 2.1 dibawah ini :

Tabel II.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang

Kode Rekening	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja hasil (Program dan Keluaran Kegiatan) s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2020)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2020		
					Target Renja PD Tahun 2019	Realisasi Renja PD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2020	Tingkat Capaian Raelisasi target renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11= (10/4)	
2	Usuran Pemerintah Wajib Non Pelayanan dasar										
2.12	Bidang Penanaman Modal										
01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran										
01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat Terkirim dengan baik	20.000	38.077	8.500	11.381	133,89	5.500	54.958	274,79
01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor setiap bulan	60	36	12	12	100	12	60	100
01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional	60	36	12	12	100	12	60	100
01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan gedung kantor setiap bulan	60	36	12	12	100	12	60	100
01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor yang memadai setiap bulan	60	36	12	12	100	12	60	100
01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan setiap bulan	60	36	12	12	100	12	60	100

01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen listrik yang mencukupi setiap bulan	60	36	12	12	100	12	60	100
01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan/peraturan perundang-undangan yang memadai setiap bulan	60	36	12	12	100	12	60	100
01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman setiap bulan	60	36	12	12	100	12	60	100
01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan ke luar daerah	Terlaksanakannya koordinasi dan rapat-rapat koordinasi di luar daerah	400	213	80	67	83,75	80	360	90
01	19	Penyediaan Jasa Keamanan	Tersedianya jasa keamanan dengan baik setiap bulan	60	36	12	12	100	12	60	100
01	20	Rapat-rapat koordinasi pendampingan pelaksanaan kegiatan	Terseleenggaranya rapat-rapat koordinasi pendampingan setiap bulan	800	627	70	73	104,29	70	770	96,25
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor										
02	07	Pngadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Jumlah Perlengkapan Kantor	25	4	2	1	50	4	9	36
02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Jumlah Peralatan Kantor	25	2	7	10	142,29	2	14	56
02	10	Pengadaan Mebeleur	Tersedianya Jumlah Mebeleur	100	30	57	55	96,49	13	98	98
02	11	Pengadaan Komputer dan Perlengkapannya	Tersedianya jumlah komputer dan perlengkapannya	20	10	20	20	100	7	37	185
02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya bangunan gedung kantor setiap bulan	60	36	12	12	100	12	60	100
02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya Kendaraan dinas/ operasional yang terpelihara dengan baik setiap bulan	60	36	12	12	100	12	60	100
02	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor dengan baik setiap bulan	60	36	12	12	100	12	60	100
02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor dengan baik setiap bulan	60	36	12	12	100	12	60	100
02	29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terpeliharanya mebeleur dengan baik setiap bulan	60	36	12	12	100	12	60	100

02	30	Pemeliharaan rutin/berkala Komputer dan Perlengkapannya	Terpeliharanya komputer dan perlengkapannya dengan baik setiap bulan	60	36	12	12	100	12	60	100
02	37	Pemeliharaan rutin berkala pagar dan pembatas lingkungan kantor	Terpeliharanya pagar dan pembatas lingkungan kantor dengan baik setiap bulan	60	36	12	12	100	12	60	100
02	45	Pemeliharaan rutin/berkala Software dan Sistem Informasi	Terpeliharanya software dan sistem informasi dengan baik	5	4	1	1	100	1	6	120
03		Program peningkatan disiplin aparatur									
03	02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	450	0	60	60	100	60	120	26,67
05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur									
05	05	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Tersedianya Sarana dan Prasarana sosialisasi pelayanan perijinan	75	22	5	5	100	4	31	41,33
05	04	Pelatihan teknis pelaksanaan tupoksi SKPD	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan teknis pelaksanaan tupoksi	250	140	83	83	100	53	276	110,4
06		Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan									
06	04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun	50	80	20	20	100	20	120	240
09		Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD									
09	02	Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD	Tersusunnya dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD	550	330	110	110	100	110	550	100
15		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi									
15	01	Peningkatan Fasilitas terwujudnya kerjasama strategis antara usaha besar dengan usaha kecil menengah	Terfasilitasinya kerjasama antara usaha besar dan usaha kecil menengah	5	3	1	1	100	1	5	100
15	02	Pengembangan potensi unggulan daerah	Tersusunnya potensi unggulan di daerah	10	4	2	3	150	1	8	80
15	05	Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal	Terselenggaranya koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal	50	43	20	23	115	15	81	162
15	07	Pengawasan dan evaluasi kinerja dan aparatur badan penanaman modal daerah	Terselenggaranya pengawasan dan evaluasi kinerja aparatur	60	36	12	12	100	12	60	100

15	08	Peningkatan kegiatan pemantauan pembinaan dan pengawasan	Terlaksananya pemantauan pembinaan dan pengawasan	200	90	42	47	111,90	40	177	88,5
15	10	Penyelenggaraan Pameran Investasi	Terselenggaranya pameran invesatasi	14	7	4	4	100	2	13	92,86
15	11	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terselenggaranya pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan perijinan	100	92	21	29	138.10	20	141	141
16	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi										
16	06	Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Peningkatan Penanaman Modal	Jumlah Pelayanan	20.000	16.087	5.000	5.875	117,50	4.000	25.962	129,81
16	07	Kajian Kebijakan Penanaman Modal	Tersusunnya kajian kebijakan dan peraturan perundang-undangan	10	9	4	4	100	3	16	160
18	Program Penanganan pengaduan di bidang investasi dan perijinan										
18	01	Fasilitasi penyelesaian permasalahan di bidang investasi dan perijinan	Terselesaikanya permasalahan di bidang investasi dan perijinan	50	25	10	10	100	10	45	90

Sedangkan untuk Target Pendapatan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Dinas PMPTSP Tahun 2019 sebesar Rp. 3.300.000.000 dengan Realisasi sebesar Rp. 4.410.326.640 (133,64%). Realisasi Sebesar 133,64% tersebut termasuk didalamnya Piutang Retribusi Izin Gangguan sebesar Rp. 825.000 yang baru di bayarkan di tahun 2019, dimana Retribusi Izin Gangguan sudah dihapus pada bulan Agustus tahun 2017.

Adapun rincian Realisasi Pendapatan Anggaran berjalan tahun 2019 adalah sebagaimana Tabel II.2 dibawah ini :

Table : II.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Realisasi Pendapatan Tahun 2019

Kode Rekening	URAIAN RETRIBUSI	TARGET ANGGARAN	REALISASI	%	KET (SISA KURANG)
1.16.1.20.30.00.00.00 0.4.1.2.03.01	IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)	3.300.000.000,00-	4.409.501.640	133,64	(1.109.501.640)
1.16.1.20.30.00.00.00 0.4.1.2.03.03	RETRIBUSI IZIN GANGGUAN/ KERAMAIAAN	-	825.000	-	Piutang Retribusi Izin Gangguan yang dibayarkan di tahun 2019, dimana Retribusi Izin Gangguan sudah dihapus pada bulan Agustus tahun 2017
JUMLAH PENDAPATAN		3.300.000.000,00	4.410.326.640	133,64	(1.109.501.640)

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat daerah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang dan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 56 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang, merupakan salah satu Dinas yang mempunyai tugas Pokok “ Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal”

Adapun jumlah realisasi perizinan yang dikeluarkan Dinas PMPTSP Kabupaten Pemalang dalam 2 tahun terakhir yaitu Tahun 2018 dan Tahun 2019 Sebagaimana tabel II.3 dibawah ini :

Tabel II.3

Realisasi Pelayanan Perizinan Tahun 2018 dan 2019

No	Jenis Ijin	Tahun 2018			Tahun 2019			Keterangan
		Masuk	Terbit	Ditolak	Masuk	Terbit	Ditolak	
1	Pendaftaran Penanaman Modal	6	6	0	-	-	-	Dihapus
2	Izin Usaha Penanaman Modal	5	5	0	-	-	-	Dihapus
3	Izin Prinsip	148	135	4	120	102	1	
4	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	244	230	1	270	266	0	
5	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	42	41	0	65	65	0	
6	Izin Lokasi	5	5	0	43	42	0	
7	Izin Pendirian Penitipan Anak Dan Kelompok Bermain	0	0	0	0	0	0	
8	Izin Produksi Air Minum Dalam Kemasan	0	0	0	0	0	0	
9	Sertifikasi Laik Hygiene Sanitasi Jasa Boga	2	2	0	7	7	0	
10	Sertifikasi Laik Hygiene Sanitasi Hotel	0	0	0	0	0	0	
11	Sertifikasi Laik Hygiene Sanitasi Kolam Renang dan Pemandian Umum	0	0	0	0	0	0	
12	Sertifikasi Laik Sehat Hygiene Sanitasi Depot Air Minum	45	45	0	73	70	0	
13	Sertifikasi Laik Hygiene Rumah Makan dan Restoran	1	1	0	0	0	0	
14	Izin Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional	4	3	0	12	10	0	
15	Izin Pemakaian Stadion Sirandu	14	14	0	4	4	0	
16	Izin Pemakaian Lapangan Mulyoharjo	5	5	0	7	4	2	
17	Izin Reklame							
	-Izin Penyelenggaraan Reklame	824	821	2	415	413	0	
	-Rekomendasi Ijin Penyelenggaraan Reklame	17	13	3	15	15	0	

18	Rekomendasi Ijin Pendirian Kantor Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS)/P4	2	1	1	3	1	1	
	Rekomendasi Perusahaan Perekrutan Pekerja Migran Indonesia	3	1	1	0	0	0	
19	Izin Instalasi Listrik	0	0	0	0	0	0	Izin dipindah Ke Provinsi
20	Izin Pesawat Tenaga Dan Produksi/Disel	0	0	0	0	0	0	
21	Izin Penyalur Petir	0	0	0	0	0	0	
22	Izin Pesawat Lift	0	0	0	0	0	0	
23	Izin Instalasi Kebakaran	0	0	0	0	0	0	
24	Izin Pesawat Angkat dan Angkut	0	0	0	0	0	0	
25	Izin Usaha Angkutan	2	2	0	9	7	0	
26	Tanda Daftar Usaha Pariwisata	36	36	0	92	90	0	
27	Ijin Usaha Pariwisata pada Kawasan Wisata Pantai Widuri Pematang	0	0	0	0	0	0	
28	Ijin Usaha Atau Tanda Daftar Usaha Perusahaan Penggilingan Padi, Huller Dan Penyosohan Beras	65	65	0	18	15	0	
29	Ijin Penyelenggaraan Perusahaan Pemberantasan Hama (Pest Control)	0	0	0	0	0	0	
30	Ijin Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet (IPPSBW)	1	1	0	0	0	0	
31	Tanda Daftar Gudang (TDG)	11	9	0	14	12	0	
	Surat izin usaha perdagangan (SIUP)	704	713	0	-	-	-	izin lewat OSS
	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	777	777	0	-	-	-	
32	Izin Usaha Industri (IUI)	0	0	0	53	52	0	
	Izin Usaha Industri (IUI) Kecil	144	148	0	-	-	-	
33	Surat Ijin Operasional Panti	6	6	0	1	1	0	
34	Izin Pemakaman	16	16	0	27	27	0	
35	Izin Pengabuan Mayat	10	10	0	17	17	0	

36	Rekomendasi Ijin Unit Transfusi Darah	0	0	0	0	0	0	
37	Izin Penyelenggaraan Optikal	3	3	0	3	3	0	
38	Izin Pendidikan Dasar	0	0	0	0	0	0	
39	Izin Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	0	0	0	11	10	0	
	- Izin Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)	3	3	0	6	5	0	
	- Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)	-	-	-	8	8	0	
40	Izin Mendirikan Rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit Khusus Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0	0	0	4	3	0	
	Izin Operasional Tetap Klinik	1	1	0	16	11	0	
41	Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kesehatan							
	-Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK)	42	40	0	67	61	0	
	-Surat Ijin Kerja Radiografer (SIKR)	8	8	0	6	6	0	
	-Surat Ijin Prakter Dokter (SIP)	123	102	0	182	151	0	
	-Surat Izin Kerja Perawat (SIKP)	352	343	0	187	181	0	
	-Surat Izin Praktik Perawat (SIPP)	24	21	0	161	134	0	
	-Surat Ijin Praktik Apoteker (SIPA)	54	50	0	77	77	0	
	-Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP-ATLM)	54	52	0	50	54	0	
	-Surat Izin Praktik Penata Anestesi (SIPPA)	6	6	0	1	1	0	
	-Surat Izin Kerja Fisioterapis (SIKF)	3	3	0	10	10	0	
	-Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian (SIKTS)	5	5	0	39	39	0	
	-Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien (SIKRO)	4	4	0	4	4	0	
	-Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan	16	16	0	0	0	0	

	Mulut (SIPTGM)							
	-Surat Izin Kerja Tenaga Promosi Kesehatan	27	27	0	4	4	0	
	-Surat Izin Praktik Bidan (SIPB)	228	219	0	183	179	0	
	-Surat Izin Kerja Tenaga Gizi (SIKTGz)	8	8	0	43	42	0	
	-Surat Izin Kerja Perekam Medis	9	9	0	11	11	0	
	-Surat Izin Praktik Elektromedis (SIP-E)	1	1	0	5	5	0	
	-Surat Izin Tukang Gigi	-	-	-	2	2	0	
	-Surat Izin Kerja Okupasi Terapis (SIKOT)	-	-	-	1	1	0	
	-Surat Izin Kerja Terapis Wicara	-	-	-	1	1	0	
42	Izin Usaha Mikro Obat Tradisional	0	0	0	0	0	0	
43	Sertifikasi Produksi Alat Kesehatan Kelas I dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) Kelas I	0	0	0	0	0	0	
44	Izin Apotek, Toko Obat dan Toko Alat Kesehatan							
	- Izin Apotek (SIA)	23	23	0	48	47	0	
	- Izin Toko Obat	3	3	0	3	3	0	
	- Izin Toko Alat Kesehatan	0	0	0	0	0	0	
45	Izin Produksi Makanan dan Minuman Industri Rumah Tangga (PIRT)	127	126	0	190	184	0	
46	Sertifikasi Laik Fungsi Bangunan Gedung	0	0	0	1	1	0	
47	Izin Pemakaian Alun-alun	2	2	0	0	0	0	
48	Izin Pemakaian Taman Patih Sampun	0	0	0	0	0	0	
49	Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	0	0	0	0	0	0	
50	Sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG)	0	0	0	0	0	0	

51	Izin Pembangunan dan Pengembangan Permukiman	0	0	0	0	0	0	
52	Izin Pengumpulan Sumbangan Dalam Daerah Kabupaten	0	0	0	0	0	0	
53	Izin dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	5	5	0	11	10	0	
54	Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten	0	0	0	0	0	0	
55	Izin Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)							
	1. Izin Pembuangan Limbah Cair	6	6	0	4	4	0	
	2. Izin TPS (Tempat Penyimpanan Sementara) Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun)	7	7	0	15	13	0	
	3. Izin Pengumpulan Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) skala Kabupaten	0	0	0	0	0	0	
56	Izin pendaurulangan sampah/ pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta	0	0	0	0	0	0	
57	Izin Pengesahan dan registrasi Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)	77	77	0	97	84	0	
58	Persetujuan permohonan pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan/atau pemusnahan sampah industri di rumah sakit, hotel dan pabrik	0	0	0	0	0	0	
59	Izin Lingkungan	37	37	0	20	20	0	
60	Izin Membuka Tanah	0	0	0	0	0	0	
61	Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT)	223	220	0	135	131	0	
62	Izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir	0	0	0	0	0	0	
63	Izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten	63	63	0	44	43	0	

64	Izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam Daerah Kabupaten	0	0	0	0	0	0	
65	Izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam Daerah Kabupaten dan beroperasi pada lintas pelabuhan di Daerah Kabupaten	0	0	0	0	0	0	
66	Izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada	0	0	0	0	0	0	
67	Izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha	0	0	0	0	0	0	
68	Izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek dalam Daerah Kabupaten yang bersangkutan	0	0	0	0	0	0	
69	Izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha	0	0	0	0	0	0	
70	Izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal	0	0	0	0	0	0	
71	Izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal	0	0	0	0	0	0	
72	Izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau	0	0	0	0	0	0	
73	Izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpul lokal	0	0	0	0	0	0	
74	Izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan lokal	0	0	0	0	0	0	
75	Izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan lokal	0	0	0	0	0	0	
76	Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal	0	0	0	0	0	0	

77	Izin Reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal	0	0	0	0	0	0	
78	Izin pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) pelabuhan pengumpan lokal	0	0	0	0	0	0	
79	Izin Mendirikan Bangunan tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter	0	0	0	0	0	0	
80	Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten	0	0	0	0	0	0	
81	Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten	0	0	0	0	0	0	
82	Izin pengadaan atau pembangunan perkeretaapian khusus, izin operasi, dan penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya dalam Daerah Kabupaten	0	0	0	0	0	0	
83	Izin Insidentil	0	0	0	0	0	0	
84	Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi	14	14	0	14	11	0	
	Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam	29	29	0	1	0	0	
85	Izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten	0	0	0	0	0	0	
86	Izin Pembelian Bahan Bakar Minyak Solar bersubsidi Untuk Usaha Mikro	2906	2907	0	3187	3187	0	
87	Izin membawa cagar budaya ke luar Daerah Kabupaten dalam 1 (satu) Daerah provinsi	0	0	0	0	0	0	
	Izin Usaha Perikanan di bidang pembudidayaan ikan yang	0	0	0	6	6	0	

88	usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten							
89	Izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam Daerah Kabupaten	0	0	0	0	0	0	
90	Izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan	0	0	0	0	0	0	
	Izin Usaha Peternakan	1	1	0	7	7	0	
	Tanda Daftar Usaha Peternakan	7	7	0	17	16	0	
	Izin Praktek Dokter Hewan	-	-	-	2	2	0	
	Izin Klinik Hewan	-	-	-	1	1	0	
91	Izin Usaha pengecer (toko, retail, sub distributor) obat hewan	0	0	0	1	1	1	
92	Izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan	0	0	0	0	0	0	
93	Izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum ditempat	0	0	0	0	0	0	
94	Izin Usaha Toko Modern	80	80	0	2	2	0	
95	Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) bagi industri kecil dan menengah	0	0	0	0	0	0	
96	Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten	0	0	0	0	0	0	
	JUMLAH	7,720	7,639	12	6.153	5.996	4	

Sedangkan Realisasi Retribusi selama dua tahun terakhir Tahun 2018 dan Tahun 2019 sebagaimana tabel II.4

Table II.4
Realisasi Retribusi Dua Tahun Terakhir
(Tahun 2018 dan Tahun 2019)

No.	Jenis Perijinan	Retribusi Tahun 2018		Retribusi Tahun 2019		Ket
		Target (Rp.)	realisasi (Rp.)	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	
1.	Reribusi IMB	2.684.000.000	2.702.775.000	3.300.000.000	4.409.501.640	
2.	Retribusi Izin Gangguan/HO	-	1.398.000	-	825.000	
	Jumlah	2.684.000.000	2.704.173.000	3.300.000.000	4.410.326.640	

Pada tabel di atas kenapa target Retribusi Izin Gangguan/ HO itu kosong karena sejak Bulan Agustus Tahun 2017 Izin Gangguan telah dihapuskan. Sedangkan untuk realisasi Izin Gangguan/ HO di tahun 2018 dan 2019 adalah pembayaran piutang pada tahun sebelumnya yang baru di bayarkan di tahun 2018 dan tahun 2019.

Selain capaian kinerja pelaksanaan kegiatan maupun keuangan sebagaimana tersebut diatas juga adanya capaian terhadap kinerja SKPD yang diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Pemalang sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel II.5
Realisasi Capaian Indikator Kinerja SKPD Tahun 2019
Yang mengacu Pada Tujuan dan sarana RPJMD
Urusan Penanaman Modal

No.	Indikator	Satuan	Tahun 2019	
			Target Capaian	Realisasi
1.	Penanaman Modal			
1	Nilai investasi berskala nasional (PMDN) (rupiah)	Rupiah	739.604.609.677	2.586.454.218.618
2	Nilai SKM	Nilai IKM	76	79,76
3	Prosentase pengaduan pelayanan perijinan dan investasi yang ditindaklanjuti/ditangani	%	100	100

Adapun untuk nilai investasi skala lokal berdasarkan data realisasi perijinan yang diterbitkan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang mengalami kenaikan yang sangat signifikan dibanding realisasi investasi tahun yang lalu sebagaimana tabel II.5, dimana realisasi investasi di Kabupaten Pemalang sampai dengan Tahun 2019 sebesar Rp. 2.586.454.218.618,00 dengan jumlah investor sebanyak 53 investor dan menyerap tenaga kerja sebanyak 8.180 orang.

Tabel II.6

**PERKEMBANGAN REALISASI INVESTASI SKALA LOKAL DI
KABUPATEN PEMALANG
LIMA TAHUN TERAKHIR (2015 – 2019)**

NO	TAHUN	NILAI INVESTASI	JUMLAH UNIT USAHA	JUMLAH TENAGA KERJA	KETERANGAN
1.	2015	282.199.754.589	925	5.194	
2.	2016	918.803.277.247	943	9.301	
3.	2017	250.608.547.834	783	5.500	
4.	2018	256.505.733.358	678	3.824	
5.	2019	1.151.376.514.677	56	21.330	

Tabel II.7
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Pemalang

No	Indikator	SPM* nasional	IKU (Perbup No.58/2018)	Target Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Anallisis
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Jumlah Nilai Investasi berskala nasional (PMDN/PMA)		Jumlah Nilai Investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	734.604.689.677	739.604.689.677	744.604.689.677	749.604.689.677	833.101.011.981	2.586.454.218.618	744.604.689.677	749.604.689.677	
2	Nilai SKM		Nilai SKM	76	76	76	76	82,97	79,76	80	81	
3	Persentase pengaduan pelayanan perijina dan investasi yang ditindaklanjuti/ditangani		Persentase pengaduan pelayanan perijina dan investasi yang ditindaklanjuti/ditangani	100	100	100	100	100	100	100	100	

2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3.1 Tantangan dan Hambatan berdasarkan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP Kabupaten Pemalang

- a. Tantangan DPMPTSP Kabupaten Pemalang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi antara lain :
 1. Semakin meningkatnya peran nilai investasi dalam perhitungan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pemalang ;
 2. Semakin tingginya harapan peran investasi dalam memecahkan permasalahan pengangguran di Kabupaten Pemalang ;
 3. Semakin tingginya harapan masyarakat atas kualitas pelayanan publik;
 4. Semakin tingginya tuntutan penerapan teknologi informasi
- b. Hambatan DPMPTSP Kabupaten Pemalang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi antara lain :
 1. Belum memiliki Mal Pelayanan Publik sesuai dengan amanat Peraturan Menteri PANRB Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik yang bertujuan untuk memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan serta meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha di Indonesia ;
 2. Upaya peningkatan Promosi Investasi belum maksimal dalam rangka meningkatkan Penanaman Modal di Kabupeten Pemalang dikarenakan belum memiliki kawasan Industri yang dikelola oleh Pemerintah;
 3. Kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk melakukan pelaporan Penanaman Modal ;
 4. Kurangnya kesadaran pelaku usaha UMKM dalam mendaftarkan izin usahanya terutama untuk desa - desa yang jauh dari DPMPTSP Kabupaten Pemalang.

2.3.2 Peluang dan Potensi berdasarkan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP Kabupaten Pemalang

Peluang dan Potensi berdasarkan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP Kabupaten Pemalang antara lain :

1. Tingginya dukungan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi terhadap Penanaman modal di Kabupaten Pemalang ;

2. Iklim usaha yang kondusif memberikan peluang pada masuknya investasi di Kabupaten Pemalang ;
3. Dukungan komitmen peningkatan pelayanan dari pemerintah daerah, provinsi maupun pusat ;
4. Adanya Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Perijinan Terpadu (SIMDU) guna memperlancar pelayanan Perijinan ;
5. Adanya Website Gerai Investasi guna mempromosikan potensi unggulan Kabupaten Pemalang.

2.3.3 Solusi untuk menyelesaikan hambatan dengan program dan kegiatan di DPMPTSP Kabupaten Pemalang antara lain :

1. Segera menyelenggarakan Mal Pelayanan Publik untuk memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan serta meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha di Indonesia ;
2. Segera membuat Kawasan Industri yang dikelola oleh Pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan nilai investasi di Kabupaten Pemalang ;
3. Meningkatkan pelayanan Klinik LKPM dan memonitoring pelaku usaha yang belum melakukan pelaporan Penanaman modal untuk melaporkan usahanya ;
4. Mendekatkan pelayanan perizinan ke desa – desa yang jauh dari DPMPTSP dengan sistem jemput bola dengan menggunakan mobil Layanan Perijinan keliling ;
5. Meningkatkan promosi potensi unggulan Kabupaten Pemalang melalui Pameran investasi, website, twitter, you tube dan pembuatan buku potensi unggulan daerah Kabupaten Pemalang ;
6. Mengadakan pelatihan teknis pelaksanaan tupoksi SKPD kepada Karyawan DPMPTSP Kabupaten Pemalang guna meningkatkan kompetensi karyawan dalam meningkatkan pelayanan terhadap pelaku usaha.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam upaya pencapaian target pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 dilakukan melalui berbagai strategi dan kebijakan yang diarahkan pada **“Pengembangan ekonomi kerakyatan, infrastruktur dasar dan konektivitas antar wilayah menuju Pemalang mandiri”**

Memperhatikan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2021 jika dikaitkan dengan kewenangan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pematang Jaya, maka prioritasnya adalah **Peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip good governance disertai dengan peningkatan pelayanan publik melalui upaya pengembangan fasilitas publik, pengembangan sistem perencanaan pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur pemerintah.**

Adapun guna untuk merealisasikan prioritas tersebut perlu disusun program dan kegiatan untuk mendukungnya, dimana berdasarkan rancangan awal RKPD yang telah disusun, program dan kegiatannya masih mengacu pada program dan kegiatan tahun berjalan atau tahun 2021.

Tabel II.8
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2021
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran seyiap bulan	12 Bulan	1.380.942,5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran seyiap bulan	12 Bulan	1.380.942,5	
1.	Penyediaan jasa surat menyurat	Dinas PMPTSP	Jumlah Surat Masuk dan Keluar	8.500 Surat terkirim	107.002,5	Penyediaan jasa surat menyurat	Dinas PMPTSP	Jumlah Surat Masuk dan Keluar	8.500 Surat terkirim	107.002,5	
2.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dinas PMPTSP	Rekening jasa sumber daya yang dibayar tiap bulan	4 Rekening/ 12 Bulan	245.200	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dinas PMPTSP	Rekening jasa sumber daya yang dibayar tiap bulan	4 Rekening/ 12 Bulan	245.200	
3.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Dinas PMPTSP	Jumlah kendaraan yang diservis dan berizin	22 Unit	33.300	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Dinas PMPTSP	Jumlah kendaraan yang diservis dan berizin	22 Unit	33.300	
4.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Dinas PMPTSP	Jumlah SDM Kebersihan setiap bulan	3 Orang/ 12 Bulan	117.100	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Dinas PMPTSP	Terpenuhinya kebersihan kantor	3 Orang/ 12 Bulan	117.100	
5.	Penyediaan alat tulis kantor	Dinas PMPTSP	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	2 Jenis/70 Buah	50.900	Penyediaan alat tulis kantor	Dinas PMPTSP	Prosentase kelancaran Administrasi Perkantoran	2 Jenis/70 Buah	50.900	
6.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Dinas PMPTSP	Jenis dan jumlah barang yang dicetak dan digandakan	19.000 Lembar	60.000	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Dinas PMPTSP	Jenis dan jumlah barang yang dicetak dan digandakan	19.000 Lembar	60.000	
7.	Penyediaan komponen instalasi	Dinas PMPTSP	Jenis dan jumlah komponen instalasi listrik yang dibeli	2 Jenis/ 200 Buah	74.040	Penyediaan komponen instalasi	Dinas PMPTSP	Jenis dan jumlah komponen instalasi listrik	2 Jenis/ 200 Buah	74.040	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	listrik/penerangan bangunan kantor					listrik/penerangan bangunan kantor		yang dibeli			
8.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dinas PMPTSP	Jenis dan jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang dibeli	12 Paket	11.600	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dinas PMPTSP	Jenis dan jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang dibeli	12 Paket	11.600	
9.	Penyediaan makanan dan minuman	Dinas PMPTSP	Jenis dan jumlah makanan dan minuman yang dibeli	3 Jenis/ Buah	80.000	Penyediaan makanan dan minuman	Dinas PMPTSP	Jenis dan jumlah makanan dan minuman yang dibeli	3 Jenis/ Buah	80.000	
10.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan keluar daerah	Dinas PMPTSP	Jumlah rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang diikuti	40 Kali/ 4 Orang	400.000	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan keluar daerah	Dinas PMPTSP	Jumlah rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang diikuti	40 Kali/ 4 Orang	400.000	
11.	Penyediaan jasa keamanan	Dinas PMPTSP	Jumlah gedung yang terjaga kemanya	12 Bulan	151.800	Penyediaan jasa keamanan	Dinas PMPTSP	Tersedianya jasa keamanan dengan baik	12 Bulan	151.800	
12.	Rapat-rapat koordinasi pendampingan pelaksanaan kegiatan	Dinas PMPTSP	Jumlah rapat koordinasi pendampingan pelaksanaan kegiatan yang terlaksana	80 Kali	50.000	Rapat-rapat koordinasi pendampingan pelaksanaan kegiatan	Dinas PMPTSP	Terselenggaranya rapat-rapat koordinaasi pendampingan pelaksanaan kegiatan	80 Kali	50.000	
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasana Aparatur		Terpenuhinya Kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik setiap bulan	12 Bulan	5.086.652,5	Program Peningkatan Sarana dan Prasana Aparatur		Terpenuhinya Kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik setiap bulan	12 Bulan	5.086.652,5	
13	Pengadaan kendaraan dinas/oprasional	Dinas PMPTSP	Jenis dan jumlah kendaraan dinas/operasional yang dibeli	1 Jenis/ 1 Unit	625.000	Pengadaan kendaraan dinas/oprasional	Dinas PMPTSP	Jenis dan jumlah kendaraan dinas/operasional yang	1 Jenis/ 1 Unit	625.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
								dibeli			
14.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Dinas PMPTSP	Jenis dan jumlah perlengkapan gedung kantor yang dibeli	1 Jenis/ 2 Buah	500.000	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Dinas PMPTSP	Jenis dan jumlah perlengkapan gedung kantor yang dibeli	1 Jenis/ 2 Buah	500.000	
15	Pengadaan peralatan gedung kantor	Dinas PMPTSP	Jenis dan jumlah peralatan gedung kantor yang dibeli	7 Jenis/ 7 Unit	452.150	Pengadaan peralatan gedung kantor	Dinas PMPTSP	Jenis dan jumlah peralatan gedung kantor yang dibeli	7 Jenis/ 7 Unit	452.150	
16.	Pengadaan mebeleur	Dinas PMPTSP	Jenis dan jumlah mebeleur yang dibeli	Jenis/ 57 Buah	239.029,5	Pengadaan mebeleur	Dinas PMPTSP	Jenis dan jumlah mebeleur yang dibeli	Jenis/ 57 Buah	239.029,5	
17.	Pengadaan komputer dan perlengkapannya	Dinas PMPTSP	jumlah komputer dan perlengkapannya yang terpenuhi	20 Unit	258.800	Pengadaan komputer dan perlengkapannya	Dinas PMPTSP	Tercukupinya kebutuhan Komputer/Laptop/Ipad	20 Unit	258.800	
18.	Pemeliharaan rukin/berkala gedung kantor	Dinas PMPTSP	Jumlah bangunan gedung kantor yang dipelihara dalam satu tahun	12 Bulan	2.541.580	Pemeliharaan rukin/berkala gedung kantor	Dinas PMPTSP	Jumlah bangunan gedung kantor yang terpelihara selama 1 Tahun	12 Bulan	2.541.580	
19.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Dinas PMPTSP	Jenis dan jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	2 Jenis/ 22 Unit	172.750	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Dinas PMPTSP	Jenis dan jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	2 Jenis/ 22 Unit	172.750	
20.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Dinas PMPTSP	Jenis dan jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	4 Jenis/ Unit	29.475	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Dinas PMPTSP	Jenis dan jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	4 Jenis/ Unit	29.475	
21.	Pemeliharaan rutin/berkala	Dinas PMPTSP	Jenis dan jumlah peralatan	4 Jenis/ 8 Unit	160.498	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan	Dinas PMPTSP	Jenis dan jumlah peralatan gedung kantor	4 Jenis/ 8 Unit	160.498	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	peralatan gedung kantor		gedung kantor yang dipelihara			gedung kantor		yang dipelihara			
22.	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Dinas PMPTSP	Jenis dan Jumlah Mebeler yang dipelihara	Jenis / Unit	10.000	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Dinas PMPTSP	Jenis dan Jumlah Mebeler yang dipelihara	Jenis / Unit	10.000	
22.	Pemeliharaan rutin/berkala komputer dan perlengkapannya	Dinas PMPTSP	Jumlah komputer dan perlengkapannya yang di pelihara	12 Bulan	15.000	Pemeliharaan rutin/berkala komputer dan perlengkapannya	Dinas PMPTSP	Jumlah Komputer dan Perlengkapannya yang terpelihara dengan baik	12 Bulan	15.000	
23.	Pemeliharaan rutin berkala pagar dan pembatas lingkungan kantor	Dinas PMPTSP	Jumlah tempat parkir dan area publik kantor yang terpelihara	12 Bulan	15.000	Pemeliharaan rutin berkala pagar dan pembatas lingkungan kantor	Dinas PMPTSP	Terpeliharanya pagar dan pembatas lingkungan kantor dengan baik selama 1 Tahun	12 Bulan	15.000	
24	Pemeliharaan rutin/berkala software dan sistim informasi	Dinas PMPTSP	Jumlah pemeliharaan software dan sistim informasi yang dipelihara	1 Kegiatan	67.370	Pemeliharaan rutin/berkala software dan sistim informasi	Dinas PMPTSP	Softwere dan Sistem Informasi/Aplikasi yang terpelihara dengan baik	1 Kegiatan	67.370	
3.	Program peningkatan disiplin aparatur		Tingkat Kedisiplinan ASN	100%	35.000	Program peningkatan disiplin aparatur		Tingkat Kedisiplinan ASN	100%	35.000	
25.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Dinas PMPTSP	Jenis dan jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang dibeli	60 Stel	35.000	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Dinas PMPTSP	Jenis dan jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang dibeli	60 Stel	35.000	
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Prosentase ASN yang mengikuti diklat terhadap jumlah ASN	100 %	559.515	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Prosentase ASN yang mengikuti diklat terhadap jumlah ASN	100	559.515	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
26.	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Dinas PMPTSP	Jumlah penyelenggaraan dan jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	4 jenis/ jml Orang	229.515	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Dinas PMPTSP	Jumlah penyelenggaraan dan jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	4 jenis/ jml Orang	229.515	
27	Pelatihan teknis pelaksanaan tupoksi SKPD	Dinas PMPTSP	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan teknis pelaksanaan tupoksi	120 Orang	330.000	Pelatihan teknis pelaksanaan tupoksi SKPD	Dinas PMPTSP	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pelatihan Teknis Pelaksanaan Tupoksi	120 Orang	330.000	
5.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		Persentase Dokumen capaian kinerja dan keuangan yang tersedia	100%	16.276	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		Jumlah Dokumen capaian kinerja dan keuangan yang tersedia	100%	16.276	
28.	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Dinas PMPTSP	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	2 Dokumen	16.276	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Dinas PMPTSP	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	2 Dokumen	16.276	
6.	Program peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD		Presentase jenis dokumen perencanaan dan penganggaran yang tersedia	100%	80.000	Program peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD		Presentase jenis dokumen perencanaan dan penganggaran yang tersedia	100%	80.000	
29.	Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD	Dinas PMPTSP	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran	90 Buku	80.000	Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD	Dinas PMPTSP	Tersusunnya dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD	90 Buku	80.000	
	Penanaman Modal					Penanaman Modal					

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
7.	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi		Jumlah Nilai investasi bersekala nasional (PMDN)	74960468967 7.00	891.810	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi		Jumlah Nilai investasi bersekala nasional (PMDN)	74960468967 7.00	891.810	
30.	Peningkatan fasilitas terwujudnya kerjasama strategis antara usaha besar dan Usaha Kecil Menengah	Dinas PMPTSP	Jumlah fasilitasi kerjasama antara usaha besar dan usaha kecil menengah	1 Kegiatan	81.654,5	Peningkatan fasilitas terwujudnya kerjasama strategis antara usaha besar dan Usaha Kecil Menengah	Dinas PMPTSP	Terselenggaranya fasilitas pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan	1 Kegiatan	81.654,5	
31.	Pengembangan potensi unggulan daerah	Dinas PMPTSP	Jumlah potensi unggulan di daerah	2 Kegiatan	203.970	Pengembangan potensi unggulan daerah	Dinas PMPTSP	Tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan	2 Kegiatan	203.970	
32.	Koordinasi Perencanaan dan pengembangan penanaman modal	Dinas PMPTSP	Jumlah koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal	20 Kali	83.410	Koordinasi Perencanaan dan pengembangan penanaman modal	Dinas PMPTSP	Terselenggaranya koordinasi perencanaan dan pengembangan modal	20 Kali	83.410	
33	Pengawasan dan evaluasi kinerja dan aparatur badan Penanaman Modal Daerah	Dinas PMPTSP	Jumlah pengawasan dan evaluasi kinerja aparatur penanaman modal daerah	12 Bulan	75.836	Pengawasan dan evaluasi kinerja dan aparatur badan Penanaman Modal Daerah	Dinas PMPTSP	Terselenggaranya pengawasan dan evaluasi kinerja dan aparatur badan Penanaman Modal Daerah	12 Bulan	75.836	
34	Peningkatan kegiatan pemantauan,	Dinas PMPTSP	Jumlah Kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	42 Kali	71.242,5	Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan	Dinas PMPTSP	Terlaksananya pemantauan, pembinaan dan pengawasan	42 Kali	71.242,5	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal					pelaksanaan penanaman modal		pelaksanaan penanaman modal			
35.	Penyelenggaraan pameran investasi	Dinas PMPTSP	Jumlah pameran investasi yang diselenggarakan	6 Kali (4 luar daerah, 2 dalam daerah)	343.927	Penyelenggaraan pameran investasi	Dinas PMPTSP	Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal kabupaten/kota	6 Kali (4 luar daerah, 2 dalam daerah)	343.927	
36.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Dinas PMPTSP	Jumlah pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan yang dilaksanakan	21 Kali	31.770	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Dinas PMPTSP	Terlaksanakannya monitoring dan evaluasi pelayanan perijinan	21 Kali	31.770	
8.	Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi		Jumlah investor bersekala nasional (PMDN/PMA)	28	1.003.304	Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi		Jumlah investor bersekala nasional (PMDN/PMA)	28	1.003.304	
37.	Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal	Dinas PMPTSP	jumlah izin terbit	5000 Izin terbit	806.389	Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal	Dinas PMPTSP	Terselesainya jumlah permohonan perijinan dengan baik	5000 Izin terbit	806.389	
38.	Kajian Kebijakan penanaman modal	Dinas PMPTSP	Jumlah kajian kebijakan penanaman modal	2 Raperbup	196.915	Kajian Kebijakan penanaman modal	Dinas PMPTSP	Tersusunnya kajian kebijakan dan peraturan perundang-undangan	2 Raperbup	196.915	
9.	Program penanganan pengaduan di bidang investasi dan perijinan		Persentase pengaduan pelayanan perijinan dan investasi yang ditindaklanjuti/ditangani	100	34.760	Program penanganan pengaduan di bidang investasi dan perijinan		Persentase pengaduan pelayanan perijinan dan investasi yang ditindaklanjuti/ditangani	100	34.760	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
39.	Fasilitas penyelesaian permasalahan di bidang investasi dan perijinan	Dinas PMPTSP	Jumlah fasilitasi penyelesaian permasalahan di bidang investasi dan perijinan	10 Kali	34.760	Fasilitas penyelesaian permasalahan di bidang investasi dan perijinan	Dinas PMPTSP	Prosetase Terfasilitasnya penanganan pengaduan di bidang investasi dan perijinan	10 Kali	34.760	

2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Bahwa Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Pemalang berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang, mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perijinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian .

Berdasarkan tugas pokok tersebut maka Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Pemalang hanya mempunyai program dan kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan perijinan terpadu satu pintu. Sehingga pada tahun anggaran 2021 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Pemalang tidak mempunyai program dan kegiatan yang menampung usulan dari masyarakat.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, Sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Visi Presiden 2020-2024 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, yang dilakukan melalui 9 misi pembangunan yaitu:

- 1) Peningkatan Kualitas manusia Indonesia;
- 2) Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing;
- 3) Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
- 4) Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
- 5) Kemajuan Budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
- 6) Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
- 7) Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
- 8) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya;
- 9) Sinergi pemerintah Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan;

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional jangka menengah tersebut, ditetapkan Tujuh agenda pembangunan nasional yang dikenal sebagai Nawa Cita kedua, memperhatikan Nawa Cita Kedua tersebut yang menjadi prioritas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pematang Jaya untuk tahun 2021 yaitu **“Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan”**

Sedangkan telaahan terhadap Renstra Badan Koordinasi Penanaman Modal tahun 2020 – 2024, Badan Koordinasi Penanaman Modal mendukung agenda pembangunan dalam RPJMN 2020 – 2024 yaitu agenda pembangunan

nomor 1 “Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan”, dimana Badan Koordinasi Penanaman Modal akan mendukung pencapaian sasaran pembangunan “Meningkatnya Nilai Tambah, Lapangan Kerja, Investasi, Ekspor, dan Daya Saing Perekonomian” yang akan dicapai melalui arah kebijakan “Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi” dan strategi “Memperbaiki Iklim Usaha dan Meningkatkan Investasi, termasuk Reformasi Ketenagakerjaan”.

Perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi akan dilaksanakan melalui:

- 1) Harmonisasi dan sinkronisasi peraturan serta kebijakan antar sektor dan wilayah;
- 2) Fasilitasi kemudahan usaha dan investasi, antara lain pemberian fasilitasi kepastian dan perpajakan, penyusunan peraturan untuk meningkatkan iklim usaha dan investasi melalui Omnibus Law perpajakan yang akan mengatur tentang PPh, PPN, pajak dan retribusi daerah, serta ketentuan umum perpajakan, perbaikan peringkat kemudahan berusaha, dan penerapan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;
- 3) Reformasi ketenagakerjaan melalui upaya penciptaan iklim ketenagakerjaan yang kondusif yang didukung oleh hubungan industrial yang harmonis, penguatan *collective bargaining*, penyempurnaan peraturan ketenagakerjaan, peningkatan keahlian dan produktivitas tenaga kerja, peningkatan peran pemerintah daerah, serta peningkatan perlindungan tenaga kerja baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Perlindungan tenaga kerja akan diwujudkan melalui penerapan sistem perlindungan *social universal* bagi pekerja, pembenahan sistem pelayanan penempatan dan perlindungan pekerja migran, dan penerapan sistem pengawasan ketenagakerjaan secara efektif;
- 4) Penguatan kebijakan dan kelembagaan persaingan usaha; dan
- 5) Peningkatan kapasitas, kapabilitas serta daya saing BUMN, antara lain melalui pembentukan *holding* BUMN dan membuka pasar pada jaringan internasional.

2. Telaahan Terhadap Kebijakan Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, pembangunan di Provinsi Jawa Tengah diarahkan untuk mencapai visi: **"Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari. Tetep Mboten Korupsi,**

Mboten Ngapusi", yang ditempuh melalui empat misi pembangunan daerah yaitu:

1. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyub untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Mempercepat reformasi birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran pemerintahan Kabupaten/Kota;
3. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran;
4. Menjadikan masyarakat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan

Arah kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2021 diarahkan pada “**Percepatan Pemulihan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat didukung Penguatan Daya Saing SDM**”. Arah kebijakan pembangunan ini telah dilakukan penyesuaian dari arah kebijakan “Peningkatan Kesejahteraan dan Perekonomian Masyarakat didukung Penguatan Daya Saing SDM”. Arah kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2021 ini dijabarkan dalam **Prioritas daerah** tahun 2021 yang juga telah dilakukan penyesuaian yaitu sebagai berikut :

7. Peningkatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup;
8. Percepatan pengurangan kemiskinan dan Pengangguran;
9. Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM berdaya saing;
10. Penguatan ketahanan bencana
11. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta peningkatan kapasitas fisik daerah.

Sedangkan telaahan terhadap Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018- 2023 Strategi dan kebijakan dalam pemenuhan tujuan pembangunan daerah untuk peningkatan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu di dalam misi pembangunan Provinsi Jawa Tengah dijabarkan sebagai berikut :

1. Misi Ke-2 yaitu Mempercepat Reformasi Birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke Pemerintah Kabupaten/Kota. Tujuan : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*).

Strategi :

- a. Membangun open government melalui upaya perkuatan keterbukaan informasi, transparansi, serta mendorong partisipasi publik, termasuk partisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. Membangun sistem manajemen pembangunan berbasis kinerja;
 - c. Meningkatkan pengawasan melalui perkuatan kapabilitas APIP, perkuatan SPIP, serta zona integritas;
 - d. Meningkatkan profesionalisme ASN melalui peningkatan kinerja, kompetensi, disiplin, dan penataan ASN;
 - e. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kelembagaan menuju struktur berbasis kinerja;
 - f. Mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean government).
2. Misi Ke-3 yaitu Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Tujuan : Menciptakan stabilitas ekonomi daerah yang berdaya saing, berbasis potensi unggulan daerah, dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan secara menyebar, inklusif, dan berkualitas. Strategi : Perbaiki iklim investasi yang semakin kondusif melalui:
- a. Pemberian kemudahan perizinan investasi
 - b. Memperbaiki sistem dan layanan perizinan mudah, murah, cepat, tepat, dan transparan;
 - c. Mengembangkan *digital investment promotion*;
 - d. Mengembangkan investasi yang mengakomodasi produk-produk unggulan kabupaten/kota;
 - e. Mendorong perwujudan investasi hijau.

3. Telaahan Terhadap Kebijakan Kabupaten Pemalang

Memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021, prioritas pembangunan terfokus pada upaya penyelesaian isu dan masalah mendesak dan berdampak luas bagi peningkatan kesejahteraan rakyat, prioritas-prioritas Pembangunan tersebut antara lain :

- a. Meningkatkan peran UMKM melalui pengembangan akses pasar, kemudahan informasi serta fasilitasi promosi;

- b. Meningkatkan daya saing produk unggulan daerah melalui penguatan kualitas produk, kelembagaan dan sarana prasana pendukung yang mempunyai keunggulan komparatif dan kompetitif, disertai dengan peningkatan nilai tambah melalui pengembangan pengelolaan produk unggulan daerah;
- c. Pemantapan pembangunan infrastruktur dengan memperhatikan keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta pengurangan bencana;
- d. Peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia melalui peningkatan pemerataan pendidikan dan kesempatan memperoleh pendidikan yang layak serta peningkatan perluasan pelayanan kesehatan;
- e. Peningkatan pembangunan pertanian dalam arti luas melalui upaya pengembangan budidaya pertanian, peningkatan sarana prasarana perikanan tangkap serta pengembangan peternakan;
- f. Percepatan penanggulangan kemiskinan secara terpadu melalui upaya peningkatan pendapatan masyarakat miskin serta pemberdayaan ekonomi mikro dan kecil untuk masyarakat miskin;
- g. Peningkatan pariwisata melalui upaya pengembangan destinasi wisata baru, peningkatan sarana dan prasarana, promosi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia disertai dengan upaya menjaga kelestarian budaya;
- h. Peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip good governance disertai dengan peningkatan pelayanan publik melalui upaya pengembangan fasilitas publik, pengembangan sistem perencanaan pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur pemerintah.

Namun demikian Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2021 dimana arah kebijakan pembangunan tahunan dirumuskan secara adaptif dan responsive terhadap perubahan lingkungan strategis yang terjadi. Imbas peningkatan penyebaran Covid 19 yang sangat berpengaruh pada kondisi kesejahteraan masyarakat, disikapi dengan penyesuaian rumusan arah kebijakan pembangunan tahun 2021 yang ditetapkan sebagai tahun pemulihan. Oleh karena itu arah kebijakan pembangunan Kabupaten Pemalang tahun 2021 adalah **Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemulihan ekonomi dan social yang didukung sumber daya manusia yang berkualitas.**

Merupakan penyesuaian dari arah kebijakan 2021 dalam RPJMD yaitu Peningkatan Derajat Sumber Daya Manusia Berkualitas Menuju Pemalang Sejahtera.

Pengembangan sumber daya manusia berkualitas menuju Pemalang yang sejahtera merupakan tema pembangunan yang diprioritaskan untuk mendukung pencapaian Misi 2 yaitu "*Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan, derajat kesehatan masyarakat, keluarga berencana, serta peningkatan keberdayaan perempuan, perlindungan sosial dan anak*".

Pada tahap ini, pembangunan difokuskan pada:

1. Pemulihan dampak pandemi *Covid-19*, yaitu:
 - a. Pemulihan ekonomi melalui peningkatan dukungan pada sektor perdagangan, UMKM, kemudahan investasi, peningkatan produksi pada sektor-sektor unggulan di Kabupaten Pemalang seperti pertanian, industri pengolahan, perdagangan dan pariwisata; serta peningkatan pembangunan infrastruktur untuk mendukung kelancaran kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat.
 - b. Percepatan penurunan kemiskinan dan pengangguran melalui pengurangan beban kemiskinan dengan distribusi bantuan sosial secara adil dan merata, meningkatkan pendapatan masyarakat; perluasan lapangan pekerjaan, peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja serta perlindungan bagi pekerja dan pencari kerja yang terdampak pandemi *Covid-19*.
2. Peningkatan kualitas hidup dan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan penanganan kesehatan dengan peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat, peningkatan kualitas SDM kesehatan, peningkatan sarana dan prasarana kesehatan; pengendalian jumlah penduduk, peningkatan pelayanan keluarga berencana dan sejahtera; peningkatan partisipasi masyarakat dalam menempuh pendidikan dengan pemberian beasiswa, peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, serta peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.
3. Peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* disertai dengan peningkatan pelayanan publik melalui upaya pengembangan fasilitas publik, pengembangan sistem perencanaan pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur pemerintah.

4. Penguatan ketahanan bencana melalui penguatan mitigasi, adaptasi, kedaruratan dan pemulihan dampak bencana. Kebijakan ini diarahkan untuk meningkatkan ketahanan masyarakat dan daerah dalam menghadapi bencana alam dan non alam.

Bereferensi pada prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 jika dikaitkan dengan kewenangan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang, maka prioritasnya adalah **Peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip good governance disertai dengan peningkatan pelayanan publik melalui upaya pengembangan fasilitas publik, pengembangan sistem perencanaan pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur pemerintah.**

Apabila mempertimbangkan prioritas pembangunan Kabupaten Pemalang pada Tahun 2021, maka Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang adalah :

1. Meningkatkan pelayanan perijinan terpadu satu pintu dengan melaksanakan kegiatan pameran, pemberian insentif kepada investor sehingga dapat menarik investor untuk berinvestasi di Kabupaten Pemalang;
2. Mengupayakan terpenuhinya sumber daya manusia pelayanan perijinan terpadu satu pintu yang sesuai dengan kompetensinya;
3. Melakukan kajian – kajian terhadap produk hukum atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelayanan perijinan terpadu satu pintu dan pemberian insentif bagi investasi.
4. Melaksanakan sosialisasi kepada para stakeholders terkait dengan peraturan perundang-undangan tentang perijinan terpadu satu pintu.
5. Melaksanakan pengawasan internal dan pengendalian secara berkala terhadap pelaksanaan pelayanan perijinan terpadu satu pintu guna meminimalisasi tingkat pengaduan atau complain dari masyarakat
6. Melakukan koordinasi, integrasi, simplifikasi dan sinkronisasi dengan SKPD terkait dalam melaksanakan pelayanan perijinan terpadu satu pintu.
7. Menyusun data potensi dan data base investasi dan perijinan;

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran visi Perangkat Daerah yang lebih spesifik dan terukur guna mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah. Dalam penentuan tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah juga tidak terlepas dari tujuan dan sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021, dengan mendasari tujuan dan sasaran tersebut dan dari analisis strategi faktor penentu keberhasilan, maka dapat dirumuskan tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pematang Jaya tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Realisasi Nilai Investasi berskala Nasional (PMDN/PMA), dengan Sasaran :
 - a) Menyelenggarakan Pameran Investasi untuk menarik Investor berinvestasi di Kabupaten Pematang Jaya.
 - b) Meningkatkan Promosi Investasi melalui Website Gerai Investasi, Twitter dan You tube.
 - c) Membuat buku Potensi Unggulan Kabupaten Pematang Jaya.
 - d) Meningkatkan fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antara usaha besar dan usaha kecil menengah.
 - e) Menyelenggarakan Klinik LKPM untuk membantu pelaku usaha dalam membuat Pelaporan Penanaman Modal.
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan perijinan yang baik, dengan sasaran :
 - a) Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran yang cukup untuk menunjang pelayanan perijinan.
 - b) Tersedianya sarana dan prasarana aparatur untuk menunjang pelayanan perijinan.
 - c) Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu untuk meningkatkan disiplin aparatur.
 - d) Terpenuhinya peningkatan SDM yang sesuai kompetensinya untuk pelayanan perijinan.
2. Mewujudkan supremasi hukum dibidang pelayanan perijinan guna menjamin adanya kepastian hukum.
 - a) Tersedianya data tentang peraturan perundang-undangan di bidang perijinan.

- b) Tersusunnya Peraturan daerah di bidang perijinan dan insentif bagi investasi.
3. Mewujudkan pola informasi dan system pelayanan perijinan yang transparan, dengan sasaran :
 - a) Tersusunnya database tentang potensi pelayanan perijinan.
 - b) Terselenggaranya sosialisasi pelayanan perijinan terpadu satu pintu.
 - c) Tersedianya sarana informasi/ sosialisasi tentang pelayanan perijinan.
 4. Menciptakan pelayanan perijinan yang mendukung peluang investasi dalam mendukung daya saing daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan sasaran :
 - a) Tersedianya prosedur pelayanan perijinan yang cepat dan tepat
 - b) Terlaksananya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah.
 5. Menurunkan tingkat pengaduan dibidang pelayanan perijinan, dengan sasaran:
 - a) Terlaksananya Pembinaan dan pengawasan kepada dunia usaha guna meminimalisasi pengaduan dan komplain masyarakat.
 - b) terselesaikannya pengaduan perijinan yang mufakat melalui musyawarah.
 - c) Terlaksananya monitoring dan evaluasi perijinan.
 6. Menyelenggarakan tertib administrasi ketatausahaan, keuangan dan pengelolaan rumahtangga guna mendukung pelayanan perijinan yang cepat, mudah, transparan dan pasti, dengan sasaran :
 - a) Tercukupinya administrasi perkantoran yang menunjang pelayanan perijinan.
 - b) Tercukupinya sarana dan prasarana yang memadai untuk pelayanan perijinan.
 - c) Tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah.
 - d) Terselenggaranya koordinasi di dalam dan ke luar daerah dengan baik

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pematang Siantar Tahun 2021 merupakan penjabaran dari Renstra

Perangkat Daerah Tahun 2016 -2021 yang bereferensi pada RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2016 – 2021. Program dan kegiatan tersebut dimaksudkan sebagai arah kinerja Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor serta terjaminnya kesinambungan pelaksanaan pembangunan antara Pemerintah Kabupaten Pemalang dan Perangkat Daerah yang menjadi bidang tugasnya.

Disamping kedudukan yang demikian, program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2019 diharapkan dapat mengakomodir aspirasi masyarakat serta mempunyai tolok ukur guna pencapaian arah kebijakan, visi dan misi Bupati Pemalang yang tertuang dalam RPJM Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 – 2021.

Sedangkan kedudukan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang harus selaras dengan sasaran dan kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021. Dimana rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan Daerah yang dijabarkan dalam 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib bukan pelayanan dasar, 8 (delapan) urusan pilihan dan 5 (lima) fungsi penunjang urusan pemerintahan. Kedudukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang dalam RKPD Tahun 2021 yaitu mengampu **Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Urusan Penanaman Modal :**

1. Prioritas : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dalam Mendukung Pelayanan Publik., melalui program yang dikembangkan adalah :
 - 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
 - 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
 - 3) Program peningkatan disiplin aparatur;
 - 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
 - 5) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan;
 - 6) Program peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD;
 - 7) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
 - 8) Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi.
 - 9) Program penanganan pengaduan di bidang investasi dan perijinan
2. Prioritas : Pengembangan Aktivitas Ekonomi Masyarakat dan Investasi Daerah dalam rangka Mendukung Perluasan Kesempatan Kerja dan

Pengurangan Penduduk Miskin., sedangkan program yang dikembangkan adalah :

- 1) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi;
- 2) Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi;
- 3) Program penanganan pengaduan di bidang investasi dan perijinan

Dari kedua prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 tersebut diatas, maka rincian program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang adalah :

- a. Program Pelayanan administrasi perkantoran, kegiatannya meliputi :
 - 1) Penyediaan jasa surat menyurat;
 - 2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber air dan listrik;
 - 3) Penyediaan jasa pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/operasional
 - 4) Penyediaan jasa kebersihan kantor;
 - 5) Penyediaan alat tulis kantor;
 - 6) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
 - 7) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
 - 8) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
 - 9) Penyediaan makanan dan minuman;
 - 10) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan ke luar daerah;
 - 11) Penyediaan jasa keamanan;
 - 12) Rapat-rapat koordinasi pendampingan pelaksanaan kegiatan.
- b. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur, kegiatannya meliputi :
 - 1) Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
 - 2) Pengadaan perlengkapan gedung kantor;
 - 3) Pengadaan peralatan gedung kantor;
 - 4) Pengadaan meubelair;
 - 5) Pengadaan komputer dan perlengkapannya;
 - 6) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;
 - 7) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;
 - 8) Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor;

- 9) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor;
 - 10) Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur;
 - 11) Pemeliharaan rutin/berkala komputer dan perlengkapannya;
 - 12) Pemeliharaan rutin/berkala pagar dan pembatas lingkungan kantor;
 - 13) Pemeliharaan rutin/berkala softwre dan sistem informasi;
- c. Program peningkatan disiplin aparatur
 - 1) Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
 - d. Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, kegiatannya meliputi:
 - 1) Sosialisasi peraturan perundang-undangan;
 - 2) Pelatihan teknis pelaksanaan tupoksi SKPD;
 - e. Program Peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, kegiatannya meliputi :
 - 1) Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun.
 - f. Program peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD, kegiatannya meliputi :
 - 1) Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD
 - g. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, kegiatannya meliputi:
 - 1) Peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antara usaha besar dan usaha kecil menengah
 - 2) Pengembangan potensi unggulan daerah
 - 3) Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal
 - 4) Pengawasan dan evaluasi kinerja dan aparatur badan penanaman modal daerah
 - 5) Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal.
 - 6) Penyelenggaraan pameran investasi.
 - 7) Monitoring, evaluasi dan pelaporan
 - h. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi, kegiatannya meliputi :
 - 1) Penyederhanaan prosedur perizinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal.
 - 2) Kajian kebijakan penanaman modal

- i. Program penanganan pengaduan di bidang investasi dan perijinan, kegiatannya meliputi :
 - 1) Fasilitasi penyelesaian permasalahan pengaduan di bidang investasi dan perijinan.

Tabel III.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.16.1.20.30.15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Meningkatnya promosi dan kerjasama investasi		749.604.689.677,00	891.810.000,00			755.292.189.677,00	980.991.000,00
1.16.1.20.30.15.01	Peningkatan fasilitas terwujudnya kerjasama strategi antara usaha besar dan usaha kecil menengah	Jumlah fasilitasi kerjasama antara usaha besar dan usaha kecil menengah	Dinas PMPTSP Kab. Pemalang	1 Kali	81.654.500,00	APBD Kab. Pemalang		1 Kali	89.819.950
1.16.1.20.30.15.02	Pengembangan potensi daerah	Jumlah potensi unggulan di daerah	Dinas PMPTSP Kab. Pemalang	2 Kegiatan	203.410.000,00	APBD Kab. Pemalang		2 Kegiatan	224.367.000
1.16.1.20.30.15.05	Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal	Jumlah koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal	Dinas PMPTSP Kab. Pemalang	20 Kali	83.410.000,00	APBD Kab. Pemalang		20 Kali	91.751.000
1.16.1.20.30.15.07	Pengawasan dan evaluasi kinerja dan aparatur badan penanaman modal daerah	Jumlah pengawasan dan evaluasi kinerja aparatur penanaman modal daerah	Dinas PMPTSP Kab. Pemalang	12 Bulan	75.836.000,00	APBD Kab. Pemalang		12 Bulan	83.419.600

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.16.1.20.30.15.08	Peningkatan Kegiatan Pemantauan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah Kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Dinas PMPTSP Kab. Pemalang	42 Kali	71.242.500,00	APBD Kab. Pemalang		42 Kali	78.366.750
1.16.1.20.30.15.10	Penyelenggaraan pameran investasi	Jumlah pameran investasi yang diselenggarakan	Dinas PMPTSP Kab. Pemalang	6 kali pameran	343.927.000,00	APBD Kab. Pemalang		6 kali pameran	378.319.700
1.16.1.20.30.15.11	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan yang dilaksanakan	Dinas PMPTSP Kab. Pemalang	21 kali	31.770.000,00	APBD Kab. Pemalang		21 kali	34.947.000
1.16.1.20.30.16	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Meningkatnya iklim investasi dan revitalisasi investasi		28 Orang	1.003.304.000,00			28 Orang	1.103.634.400
1.16.1.20.30.16.06	Penyederhanaan prosedur perizinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal	jumlah izin terbit	Dinas PMPTSP Kab. Pemalang	5.000 Izin Terbit	806.389.000,00	APBD Kab. Pemalang		5.000 Izin Terbit	887.027.900
1.16.1.20.30.16.07	Kajian Kebijakan Penanaman Modal	Jumlah kajian kebijakan penanaman modal	Dinas PMPTSP Kab. Pemalang	2 raperbup	196.915.000,00	APBD Kab. Pemalang		2 raperbup	216.606.500

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.16.1.20.30.18	Program penanganan pengaduan di bidang investasi dan perijinan	Presentase pengaduan pelayanan perijinan dan investasi yang ditindaklanjuti/ditangani		100%	34.760.000,00			100%	38.236.000,00
1.16.1.20.30.18.01	Fasilitasi penyelesaian permasalahan dibidang investasi dan perijinan	Jumlah fasilitasi penyelesaian permasalahan di bidang investasi dan perijinan	Dinas PMPTSP Kab. Pemalang	10 Kali	34.760.000,00	APBD Kab. Pemalang		10 Kali	38.236.000,00
1.20.1.20.30.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya pelayanan administarsi perkantoran untuk meningkatkan kinerja terhadap kebutuhan		12 bulan	1.580.942.500,00			12 bulan	1.519.036.750,00
1.20.1.20.30.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Keluar	Dinas PMPTSP Kab. Pemalang	8.500 Surat	107.002.500,00	APBD Kab. Pemalang		8.500 Surat	117.702.750
1.20.1.20.30.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Rekening jasa sumber daya yang dibayar tiap bulan	Dinas PMPTSP Kab. Pemalang	4 Rekening/ 12 Bulan	445.200.000,00	APBD Kab. Pemalang		4 Rekening/ 12 Bulan	269.720.000
1.20.1.20.30.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan yang diservis dan berizin	Dinas PMPTSP Kab. Pemalang	22 Unit	33.300.000,00	APBD Kab. Pemalang		22 Unit	36.630.000

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.20.1.20.30.01.08	Penyedia jasa kebersihan kantor	Jumlah SDM Kebersihan setiap bulan	Dinas PMPTSP Kab. Pematang	3 Orang/ 12 Bulan	117.100.000,00	APBD Kab. Pematang		3 Orang/ 12 Bulan	128.810.000
1.20.1.20.30.01.10	Penyedia alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	Dinas PMPTSP Kab. Pematang	2 Jenis/70 Buah	50.900.000,00	APBD Kab. Pematang		2 Jenis/70 Buah	55.990.000
1.20.1.20.30.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jenis dan jumlah barang yang dicetak dan digandakan	Dinas PMPTSP Kab. Pematang	19.000 Lembar	60.000.000,00	APBD Kab. Pematang		19.000 Lembar	66.000.000
1.20.1.20.30.01.12	Penyedia komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jenis dan jumlah komponen instalasi listrik yang dibeli	Dinas PMPTSP Kab. Pematang	2 Jenis/ 200 Buah	74.040.000,00	APBD Kab. Pematang		2 Jenis/ 200 Buah	81.444.000
1.20.1.20.30.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jenis dan jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang dibeli	Dinas PMPTSP Kab. Pematang	12 Paket	11.600.000,00	APBD Kab. Pematang		12 Paket	12.760.000
1.20.1.20.30.01.17	Penyedia makanan dan minuman	Jenis dan jumlah makanan dan minuman yang dibeli	Dinas PMPTSP Kab. Pematang	3 Jenis/ Buah	80.000.000,00	APBD Kab. Pematang		3 Jenis/ Buah	88.000.000

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.20.1.20.30.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi didalam dan keluar daerah	Jumlah rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang diikuti	Dinas PMPTSP Kab. Pematang	40 Kali/ 4 Orang	400.000.000,00	APBD Kab. Pematang		40 Kali/ 4 Orang	440.000.000
1.20.1.20.30.01.19	Penyediaan jasa keamanan	Jumlah gedung yang terjaga kemanya	Dinas PMPTSP Kab. Pematang	12 Bulan	151.800.000,00	APBD Kab. Pematang		12 Bulan	166.980.000
1.20.1.20.30.01.20	Rapat-rapat koordinasi pendampingan pelaksanaan kegiatan	Jumlah rapat koordinasi pendampingan pelaksanaan kegiatan yang terlaksana	Dinas PMPTSP Kab. Pematang	80 kali	50.000.000,00	APBD Kab. Pematang		80 kali	55.000.000
1.20.1.20.30.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur untuk meningkatkan kinerja terhadap kebutuhan		12 bulan	5.092.652.500			12 bulan	5.134.502.500
1.20.1.20.30.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jenis dan jumlah kendaraan dinas/operasional yang dibeli	Dinas PMPTSP Kab. Pematang	1 Jenis/ 1 Unit	625.000.000,00	APBD Kab. Pematang		1 Jenis/ 1 Unit	687.500.000
1.20.1.20.30.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jenis dan jumlah perlengkapan gedung kantor yang dibeli	Dinas PMPTSP Kab.	1 Jenis/ 2 Buah	500.000.000,00	APBD Kab. Pematang		1 Jenis/ 2 Buah	550.000.000

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Pemalang						
1.20.1.20.30.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jenis dan jumlah peralatan gedung kantor yang dibeli	Dinas PMPTSP Kab. Pemalang	7 Jenis/7 Unit	458.150.000,00	APBD Kab. Pemalang		7 Jenis/7 Unit	550.000.000
1.20.1.20.30.02.10	Pengadaan meubelair	Jenis dan jumlah mebeleur yang dibeli	Dinas PMPTSP Kab. Pemalang	Jenis/ 57 Buah	239.029.500,00	APBD Kab. Pemalang		Jenis/ 57 Buah	262.932.450
1.20.1.20.30.02.11	Pengadaan komputer dan perlengkapan	jumlah komputer dan perlengkapannya yang terpenuhi	Dinas PMPTSP Kab. Pemalang	20 Unit	258.800.000,00	APBD Kab. Pemalang		20 Unit	284.680.000
1.20.1.20.30.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah dan luas gedung kantor yang diperlihara	Dinas PMPTSP Kab. Pemalang	1 Unit/ 762 m2	2.541.580.000,00	APBD Kab. Pemalang		1 Unit/ 762 m2	2.795.738.000
1.20.1.20.30.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasioanl	Jenis dan jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Dinas PMPTSP Kab. Pemalang	2 Jenis/ 22 Unit	172.750.000,00	APBD Kab. Pemalang		2 Jenis/ 22 Unit	190.025.000
1.20.1.20.30.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapn gedung kantor	Jenis dan jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	Dinas PMPTSP Kab.	4 Jenis/ Unit	29.475.000,00	APBD Kab.		4 Jenis (12 Bulan)	32.422.500

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Pemalang			Pemalang			
1.20.1.20.30.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jenis dan jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	Dinas PMPTSP Kab. Pemalang	Jenis/ 20 Unit	160.498.000,00	APBD Kab. Pemalang		Jenis/ 20 Unit	176.547.800
1.20.1.20.30.02.29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Jenis dan Jumlah Mebeler yang dipelihara	Dinas PMPTSP Kab. Pemalang	Jenis/ Buah	10.000.000,00	APBD Kab. Pemalang		Jenis/ Buah	11.000.000
1.20.1.20.30.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala komputer dan perlengkapannya	Jumlah komputer dan perlengkapannya yang di pelihara	Dinas PMPTSP Kab. Pemalang	12 Bulan (4 jenis)	15.000.000,00	APBD Kab. Pemalang		12 Bulan (4 jenis)	16.500.000
1.20.1.20.30.02.37	Pemeliharaan rutin/berkala pagar dan pembatas lingkungan kantor	Jumlah tempat parkir dan area publik kantor yang terpelihara	Dinas PMPTSP Kab. Pemalang	12 Bulan	15.000.000,00	APBD Kab. Pemalang		12 Bulan	16.500.000
1.20.1.20.30.02.45	Pemeliharaan rutin/berkala software dan sistem informasi	Jumlah pemeliharaan software dan sistim informasi yang dipelihara	Dinas PMPTSP Kab. Pemalang	1 Kegiatan	67.370.000,00	APBD Kab. Pemalang		1 Kegiatan	74.107.000

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.20.1.20.30.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur		100%	35.000.000,00			100%	38.500.000
1.20.1.20.30.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jenis dan jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang dibeli	Dinas PMPTSP Kab. Pemalang	60 Stel	35.000.000,00	APBD Kab. Pemalang		60 Stel	38.500.000
1.20.1.20.30.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur		100 %	559.515.000,00			100 %	615.466.500
1.20.1.20.30.05.02	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah penyelenggaraan dan jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	Dinas PMPTSP Kab. Pemalang	4 Kali/ Jml Orang	229.515.000,00	APBD Kab. Pemalang		4 Kali/ Jml Orang	252.466.500
1.20.1.20.30.05.04	Pelatihan teknis pelaksanaan Tupoksi SKPD	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan teknis pelaksanaan tupoksi	Dinas PMPTSP Kab. Pemalang	120. Orang	330.000.000,00	APBD Kab. Pemalang		120. Orang	363.000.000
1.20.1.20.30.06	Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan	tersusunnya laporan capaian kinerja dan keuangan tahunan		100%	16.276.000,00			100%	17.903.600

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	keuangan								
1.20.1.20.30.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	Dinas PMPTSP Kab. Pemalang	2 Dokumen	16.276.000,00	APBD Kab. Pemalang		2 Dokumen	17.903.600
1.20.1.20.30.09	Program Peningkatan Perencanaan dan penganggaran SKPD	Terwujudnya peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD		100%	80.000.000,00			100%	88.000.000
1.20.1.20.30.09.02	Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran	Dinas PMPTSP Kab. Pemalang	90 Buku	80.000.000,00	APBD Kab. Pemalang		90 Buku	88.000.000
	JUMLAH				9.294.260.000				10.049.721.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang tahun 2021 ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021.

Rumusan rencana kerja dan pendapatan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2021 sebagaimana tabel terlampir :

Tabel 4.1

**MATRIK RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2021**

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Program / Kinerja	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021 dan 2022				Lokasi
					Tahun 2021		Tahun 2022		
					Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, penegakan supermasi hukum serta kemudahan investasi dan daya saing daerah	Meningkatnya investasi di Kabupaten Pemalang		Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/ PMA)	749.604.689.677		755.292.189.677		
		Meningkatnya Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik		Nilai SKM	B (76)		B (76)		

				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya kebutuhan perkantoran setiap bulan	12 Bulan	1.580.942.500	12 Bulan	1.519.036.750
			1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat terkirim selama satu tahun	8500.00 Surat	107.002.500	8500.00 Surat	117.702.750
			2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah kebutuhan jasa komunikasi, air dan listrik kantor	12.00 Bulan	445.200.000	12.00 Bulan	269.720.000
			3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan dan perijinan kendaraan/ oprasional dalam satu tahun	12.00 Bulan	33.300.000	12.00 Bulan	36.630.000
			4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah gedung yang terpelihara kebersihannya	12.00 Bulan	117.100.000	12.00 Bulan	128.810.000
			5	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	12.00 Bulan	50.900.000	12.00 Bulan	55.990.000
			6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah dokumen yang dicetak	12.00 Bulan	60.000.000	12.00 Bulan	66.000.000
			7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang tersedia	12.00 Bulan	74.040.000	12.00 Bulan	81.444.000
			8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan/peraturan perundang-undangan yang tersedia	12.00 Bulan	11.600.000	12.00 Bulan	12.760.000
			9	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman pegawai	12.00 Bulan	80.000.000	12.00 Bulan	88.000.000

			10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan ke luar daerah	Jumlah rapat – rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	85.00 Kali	400.000.000	85.00 Kali	440.000.000	
			11	Penyediaan Jasa Keamanan	Jumlah gedung yang terjaga kemannya	12.00 Bulan	151.800.000	12.00 Bulan	166.980.000	
			12	Rapat-rapat koordinasi pendampingan pelaksanaan kegiatan	Jumlah rapat koordinasi pendampingan pelaksanaan kegiatan yang terlaksana	80.00 Kali	50.000.000	80.00 Kali	55.000.000	
			2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik setiap bulan	12 Bulan	5.092.652.500	12 Bulan	5.647.952.750	
			1	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional	1.00 Unit	625.000.000	1.00 Unit	687.500.000	
			2	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	jumlah perlengkapan kantor gedung kantor yang disediakan	1.00 Unit	500.000.000	1.00 Unit	550.000.000	
			3	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpenuhi	7.00 Unit	458.150.000	7.00 Unit	550.000.000	
			4	Pengadaan mebeleur	jumlah mebelur yang tersedia	57.00 Buah	239.029.500	57.00 Buah	262.932.450	
			5	Pengadaan komputer dan perlengkapannya	jumlah komputer dan perlengkapannya yang terpenuhi	20.00 Unit	258.800.000	20.00 Unit	284.680.000	
			6	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah bangunan gedung kantor yang dipelihara dalam satu tahun	12.00 Bulan	2.541.580.000	12.00 Bulan	2.795.738.000	
			7	Pemeliharaan rutin/berkala	Jumlah kendaraan dinas/oprasional	12.00 Bulan	172.750.000	12.00 Bulan	190.025.000	

				kendaraan dinas/operasional	yang dipelihara					
			8	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	12.00 Bulan	29.475.000	12.00 Bulan	32.422.500	
			9	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	12.00 Bulan	160.498.000	12.00 Bulan	176.547.800	
			10	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Jumlah mebeleur kantor yang dipelihara	12.00 Bulan	10.000.000	12.00 Bulan	11.000.000	
			11	Pemeliharaan rutin/berkala komputer dan perlengkapannya	Jumlah komputer dan perlengkapannya yang di pelihara	12.00 Bulan	15.000.000	12.00 Bulan	16.500.000	
			12	Pemeliharaan rutin berkala pagar dan pembatas lingkungan kantor	Jumlah tempat parkir dan area publik kantor yang terpelihara	12.00 Bulan	15.000.000	12.00 Bulan	16.500.000	
			13	Pemeliharaan rutin/berkala software dan sistim informasi	Jumlah pemeliharaan software dan sistim informasi yang dipelihara	1.00 Kegiatan	67.370.000	1.00 Kegiatan	74.107.000	
			3	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Tingkat Kedisiplinan ASN	100 %	35.000.000	100 %	38.500.000	
			1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	60 Stel	35.000.000	60 Stel	38.500.000	
			4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase SDM aparatur yang memiliki kompetensi	100 %	559.515.000	100 %	615.466.500	
			1	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah sosialisasi peraturan perundang – undangan yang	4.00 Kali	229.515.000	4.00 Kali	252.455.500	

					terlaksana					
			2	Pelatihan teknis pelaksanaan tupoksi SKPD	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan teknis pelaksanaan tupoksi	120.00 Orang	330.000.000	120.00 Orang	363.000.000	
			5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase jumlah dokumen capaian kinerja dan keuangan	100%	16.276.000	100%	17.903.600	
			1	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	30.00 Buku	16.276.000	30.00 Buku	17.903.600	
			6	Program peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD	Prosentase jenis dokumen perencanaan dan penganggaran yang tersedia	100%	80.000.000	100%	88.000.000	
			1	Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran	90 Buku	80.000.000	90 Buku	88.000.000	
			7	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN)	749.604.689.667	891.810.000	755.292.189.677	980.991.000	
			1	Peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antara usaha besar dan Usaha Kecil Menengah	Jumlah fasilitasi kerjasama antara usaha besar dan usaha kecil menengah	1.00 Kegiatan	81.654.500	1.00 Kegiatan	89.819.950	

			2	Pengembangan potensi unggulan daerah	Jumlah potensi unggulan di daerah	2.00 Kegiatan	203.970.000	2.00 Kegiatan	224.367.000	
			3	Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal	Jumlah koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal	20.00 Kali	83.410.000	20.00 Kali	91.751.000	
			4	Pengawasan dan evaluasi kinerja dan aparatur Badan Penanaman Modal Daerah	Jumlah pengawasan dan evaluasi kinerja aparatur penanaman modal daerah	12.00 Bulan	75.836.000	12.00 Bulan	83.419.600	
			5	Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah Kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	42.00 Kali	71.242.500	42.00 Kali	78.366.750	
			6	Penyelenggaraan pameran investasi	Jumlah pameran investasi yang diselenggarakan	6.00 Kegiatan	343.927.000	6.00 Kegiatan	378.319.700	
			7	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan yang dilaksanakan	21.00 Kali	31.770.000	21.00 Kali	34.947.000	
			8	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Jumlah Investor berskala nasional (PMDN/PMA)	28.00 Orang	1.003.304.000	28.00 Orang	1.103.634.400	
			1	Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal	jumlah izin terbit	5000.00 Izin terbit	806.389.000	5000.00 Izin terbit	887.027.900	
			2	Kajian kebijakan penanaman modal	Jumlah kajian kebijakan penanaman modal	2 Raperbup	196.915.000	2 Raperbup	216.606.500	

			9	Program penanganan pengaduan di bidang investasi dan perijinan	Presentase pengaduan pelayanan perijinan dan investasi yang ditindaklanjuti/ditangani	100.00%	34.760.000	100.00%	38.236.000		
			1	Fasilitasi penyelesaian permasalahan di bidang investasi dan perijinan	Jumlah fasilitasi penyelesaian permasalahan di bidang investasi dan perijinan	10.00 Kali	34.760.000,	10.00 Kali	38.236.000		
TOTAL								9.294.260.000		10.049.710.000	

BAB V

PENUTUP

Rencana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2021 merupakan dokumen rencana pembangunan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2021 disusun mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2021 memuat sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Program dan kegiatan yang dilaksanakan sifatnya masih indikatif sehingga harus disesuaikan dengan pembiayaan/anggaran yang tersedia.

Demikian Rencana Kerja (Renja SKPD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2021 agar dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang.

Dalam pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2021 dimungkinkan terjadi perkembangan dan dinamika pembangunan yang harus diakomodir. Sebagai konsekuensinya, diperlukan langkah-langkah penyesuaian terhadap Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2021 yang akan terwujud dalam Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2021.

Pemalang, 12 Agustus 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PEMALANG



KHAERON, SH, MM

Pembina Tk. I

NIP. 19680323 199003 1 012

LAMPIRAN

1. Mapping Nomenklatur Program dan Kegiatan RPJMD dan Permendagri 90 tahun 2019

MAPPING NOMENKLATUR PROGRAM DAN KEGIATAN RPJMD DAN PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
URUSAN PENANAMAN MODAL (DPMPTSP)

RPJMD 2016-2021					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019				
NO	PROGAM	KEGIATAN	INDIKATOR/AKTIVITAS KEGIATAN	KODE REKENING	SUB KEGIATAN	INDIKATOR/AKTIVITAS KEGIATAN	KEGIATAN	PROGRAM	KODE REKENING
2	Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD	- Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran - Jumlah DPA/DPPA - Jumlah dokumen RKA/RKAP	2.12.2.12.01.09.0 2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang dibuat	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	2.18.01.2.01.01
3			- Jumlah dokumen Renja - Jumlah dokumen Renstra		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			2.18.01.2.01.02
4			- Jumlah dokumen LKjIP, LPPD		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang tersusun			2.18.01.2.01.03
5			- Perjalanan Dinas		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD yang tersusun			2.18.01.2.01.04
6					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD yang tersusun			2.18.01.2.01.05

7					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja yang dibuat			2.18.01.2.01.06
	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Pengawasan dan evaluasi kinerja dan aparatur badan penanaman modal daerah	Jumlah pengawasan dan evaluasi kinerja aparatur Badan Penanaman Modal	2.12.2.12.01.15.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah pengawasan dan evaluasi kinerja aparatur Badan Penanaman Modal yang terlaksana			2.18.01.2.01.07
10					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah gaji dan tunjangan ASN yang disediakan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		2.18.01.2.02.01
	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	2.12.2.12.01.06.04	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi	jumlah bahan pelaksanaan verifikasi yang tersedia			2.18. 01.2.02.03
					Penyusunan Akuntansidan Pelaporan Keuangan	Jumlah laporan keuangan yang tersusun			2.18. 01.2.02.04
					Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Semesteran	- Jumlah laporan keuangan bulanan/semesteran yang tersusun			2.18. 01.2.02.07
8			Jumlah laporan keuangan bulanan/semesteran		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan Prognosis realisasi anggaran yang tersusun			2.18. 01.2.02.08

9					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun tersusun			2.18.01.2.02.05
11					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah pelaksanaan panatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan yang terlaksana tiap bulan			2.18.01.2.02.03
12		Penyediaan Jasa Keamanan	Jumlah gedung yang terjaga keamanannya	2.12.2.12.01.01.1 9	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	jumlah kebutuhan barang milik daerah SKPD yang terjaga kemanannya	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		2.18.01.2.03.02
					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah kebutuhan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang terpenuhi			2.18. 01.2.03.03
					Penyediaan jasa Administrasi Keuangan	Jumlah kebutuhan Jasa Administrasi Keuangan yang terpenuhi			2.18. 01. 2.03. 07
					Penyedia Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah kebutuhan Perbaikan Peralatan Kerja yang terpenuhi			2.18. 01. 2.03. 09
					Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang dilaksanakan			2.18. 01. 2.03. 18
	Progam pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah dokumen yang dicetak, jumlah penggandaan	2.12.2.12.01.01.1 1	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis dan jumlah barang yang dicetak dan digandakan	Administrasi Umum Perangkat Daerah		2.18.01.2.06.05

		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah bangunan kantor yang terpelihara instalasi listrik /penerangannya	2.12.2.12.01.01.1 2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang terpenuhi			2.18.01.2.06.01
		Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	2.12.2.12.01.01.1 0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah kebutuhan logistik yang terpenuhi			2.18.01.2.06.04
		Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Makanan dan Minuman beserta pendukungnya yang tersedia	2.12.2.12.01.01.1 7	Fasilitas Kunjungan Tamu	jumlah kunjungan tamu			2.18.01.2.06.08
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	2.12.2.12.01.01.1 5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan			2.18.01.2.06.06
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan ke luar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi kedalam dan luar daerah yang dilaksanakan	2.12.2.12.01.01.1 8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah kebutuhan rapat koordinasi dan konsultasi skpd			2.18.01.2.06.09
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor	Pengadaan Komputer dan Perlengkapannya	jumlah komputer dan perlengkapannya	2.12.2.12.01.02.1 1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang di beli	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		2.18.01.2.07.06
		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan gedung Kantor yang disediakan	2.12.2.12.01.02.0 7	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan gedung Kantor yang disediakan			2.18.01.2.03.22
		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan gedung Kantor yang disediakan	2.12.2.12.01.02.0 9	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan gedung Kantor yang disediakan			2.18.01.2.03.24
		Pengadaan Mebeleur	Jumlah Mebeleur disediakan	2.12.2.12.01.02.1 0	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Mebeleur disediakan			2.18.01.2.03.25

	Progam pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat keluar yang terkirim	2.12.2.12.01.01.01 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar			2.18.01.2.08.01
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	2.12.2.12.01.01.02 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik, publikasi, dan internet yang terpenuhi			2.18.01.2.08.02
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah gedung yang terpelihara kebersihannya	2.12.2.12.01.01.08 8	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah kebutuhan jasa pelayanan umum kantor			2.18.01.2.08.04
		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional dalam 1 Tahun	2.12.2.12.01.01.06 6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kebutuhan pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional yang terpenuhi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		2.18.01.2.09.02
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah Kendaraan dinas/ operasional yang terpelihara dengan baik	2.12.2.12.01.02.24 4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kebutuhan pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas Jabatan yang terpenuhi			2.18.01.2.09.01

		Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara dengan baik	2.12.2.12.02.02.2 6	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah kebutuhan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor			2.18.01.2.09.10
		Pemeliharaan rutin berkala pagar dan pembatas lingkungan kntor	Terpeliharanya pagar dan pembatas lingkungan kantor dengan baik setiap bulan	2.12.2.12.01.02.3 7					
		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor dipelihara dengan baik	2.12.2.12.01.02.2 8	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang di pelihara			2.18.01.2.09.06
		Pemeliharaan rutin/berkala Softwere dan Sistem Informasi	Terpeliharanya softwere dan sistem informasi dengan baik	2.12.2.12.01.02.4 5					
		Pemeliharaan rutin/berkala Komputer dan Perlengkapanya	Terpeliharanya komputer dan perlengkapannya dengan baik setiap bulan	2.12.2.12.01.02.3 0					
		Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Jumlah mebeleur dengandipelihara dengan baik	2.12.2.12.01.02.2 9					
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	jumlah bangunan gedung kantor yang dipelihara	2.12.2.12.01.02.2 2	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				
		Rapat-rapat koordinasi pendampingan pelaksanaan kegiatan	Jumlah rapat koordinasi pendampingan pelaksanaan kegiatan yang terlaksana	2.12.2.12.01.01.2 0					
					Penyediaan jasa perbaikan Peralatan	Jumlah pemeliharaan sistem informasi manajemen selama 12 bulan			

	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	jumlah kendaraan dinas / operasional	2.12.2.12.01.02.0 5	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	jumlah kendaraan dinas / operasional			2.18. 01. 2.03. 20
					Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung	Jumlah peralatan gedung kantor dipelihara dengan baik			2.18. 01. 2.03. 34
					Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung	Jumlah peralatan gedung kantor dipelihara dengan baik			2.18. 01. 2.03. 34
					Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Jumlah mebeleur dengandipelihara dengan baik			2.18. 01. 2.03. 35
					Rehabilitasi Sedang / Berat Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah kendaraan/operasional yang direhabilitasi sedang dan berat			2.18. 01. 2.03. 40
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapan	Jumlah kebutuhan pakaian dinas harian yang disediakan	2.12.2.12.01.03.0 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah kebutuhan pakaian dinas harian yang terpenuhi	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya		2.18. 01. 2.04. 02
							Pengadaan Mesin / Kartu Absensi		2.18. 01. 2.04. 01
							Pengadaan Pakaian Korpri		2.18. 01. 2.04. 04
							Pengadaan Pakaian Khusus Hari - Hari tertentu		2.18. 01. 2.04. 05
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah sosialisasi pelayanan perijinan yang dilaksanakan	2.12.2.12.01.05.0 2	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah sosialisasi pelayanan perijinan yang dilaksanakan	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		2.18.01.2.05.10

		Pelatihan teknis pelaksanaan tupoksi SKPD	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan teknis pelaksanaan tupoksi	2.12.2.12.01.05.0 4	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan teknis pelaksanaan tupoksi			2.18.01.2.05.11
	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan perijinan	2.12.2.12.01.15.1 1	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas / insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman Modal	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		2.18.02.2.01.02
					Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas / insentif dan kemudahan Penanaman Modal	jumlah peraturan perundang-undangan yang tersusun			2.18. 02.2.01.01
		Peningkatan Fasilitas terwujudnya kerjasama strategis antara usaha besar dengan usaha kecil menengah	jumlah fasilitas kerjasama antara usaha besar dan usaha kecil menengah	2.12.2.12.01.15.0 1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan pelaksanaan penanaman modal	jumlah koordinasi dan sinkronisasi pembinaan bidang penanaman modal	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Dan Kota		2.18.05,2.01.02
	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Pengembangan potensi unggulan daerah	Jumlah pengembangan potensi unggulan daerah	2.12.2.12.01.15.0 2	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kajian peta potensi dan peluang usaha yang tersusun	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		2.18. 02. 2.02.02

	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Kajian Kebijakan Penanaman modal	Jumlah kajian kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan	2.12.2.12.01.16.07	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah rancangan umum penanaman Modal yang tersusun	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten / Kota		2.18. 02.2.02.01
		Penyelenggaraan Pameran Investasi	Jumlah pameran invesatasi	2.12.2.12.01.15.10	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah promosi Penanaman Modal yang terlaksana	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Program Promosi Penanaman Modal	2.18. 03.2.01.02
					Penyusunan Strategis Promosi Penanaman Modal	Jumlah dokumen kajian strategis promosi penanaman modal yang tersusun			2.18. 03.2.01.01
	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Peningkatan Penanaman Modal	Jumlah Perijinan	2.12.2.12.01.16.06	Penyediaan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik	Jumlah ijin terbit yang terpenuhi	pelayanan perijinan dan non perijinan secara terpadu satu pintu dibidang PM yang menjadi kewenangan daerah Kab/Kota	Program pelayanan penanaman modal	2.18. 04.2.01.01
		perjalanan dinas			Pemantauan Pemenuhan Komitment Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah cek lokasi/laporan perijinan yang terlaksana			2.18. 04.2.01.02

		Indeks Kepuasan Masyarakat			pengolahan penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perijinan dan non perijinan berbasis pelayanan perijinan berusaha terintegrasi secara elektronik	jumlah data/informasi pelayanan perijinan yang tersedia	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi pada tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	2.18.06.2.01.01
		Perjalanan luar daerah			Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif Daerah	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi terkait fasilitasi tindaklanjut Perpes 79 (Pembangunan energi terpadu di Kabupaten Pematang)	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Program Pelayanan Penanaman Modal	2.18. 04. 2.01.04
Fasilitasi	fasilitasi penyelesai permasalahan di bidang investasi dan perijinan	jumlah pengaduan yang ditangani	2.12.2.12.01.18.01	Penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan perijinan dan non perijinan	jumlah layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan				2.18. 04.2.01.03

	Peningkatan kegiatan pemantauan pembinaan dan pengawasan	Jumlah pemantauan pembinaan dan pengawasan	2.12.2.12.01.15.08	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pembinaan dan pengawasan bidang penanaman modal	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal	2.18. 05.2.01.01
				Koordinasi dan sinkronisasi pembinaan pelaksanaan Penanamam Modal	jumlah kordinasi dan snkronisasi pembinaan pelaksanaan Penanaman Modal			2.18. 05.2.01.02
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang nilai investasinya diatas 500 juta			2.18. 05.2.01.03